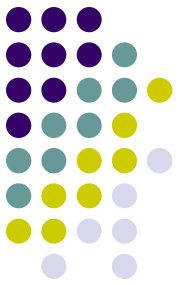


Dasar-2 Perencanaan dan Pembangunan Wilayah (2 sks)



Iwan Nugroho

<http://iwanuwg.wordpress.com>

iwanuwg@yahoo.com

**FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
UNIVERSITAS WIDYAGAMA
MALANG
2006**



Tujuan

1. Memahami konsep *pembangunan wilayah* dan posisinya di dalam pembangunan secara umum
2. Menerapkan konsep *pembangunan wilayah* di dalam pembangunan
3. Melakukan analisis untuk memecahkan permasalahan pembangunan berdasarkan konsep *pembangunan wilayah*

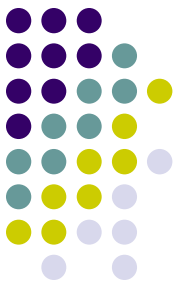
DAFTAR PUSTAKA

- Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. Penerbit Pustaka LP3ES Jakarta. 381p.
- Blair, J. P. 1991. *Urban and Regional Economics*. Irwin, Hometown. 585p.
- Hoover, E. M. and F. Giarratani. 1985. *An Introduction to Regional Economics*. Alfred A. Knopf, New York. 444p.



POKOK BAHASAN

1. PENDAHULUAN
2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
3. WILAYAH PASAR, SISTEM PERKOTAAN
4. AGLOMERASI
5. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN WILAYAH
6. PEMBANGUNAN EKONOMI
7. ALIRAN KOMODITI DAN SUMBERDAYA
8. PENGGUNAAN LAHAN
9. KEMISKINAN WILAYAH
10. PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERDESAAN
11. PEMBANGUNAN PERKOTAAN
12. AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH



I. PENDAHULUAN

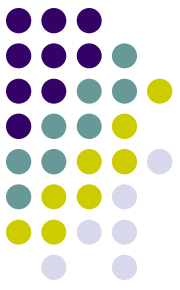


Mengapa Pembangunan Wilayah

- **Pengalaman negara lain (Singapura, Hongkong, Australia)**
- **Perlunya aspek sosial dan lingkungan, utk mengurangi dampak pembangunan akibat aspek ekonomi (mekanisme pasar)**
- **Pembangunan bersifat merata antar wilayah (*inter-region*) dan antar waktu (*inter-generation*).**



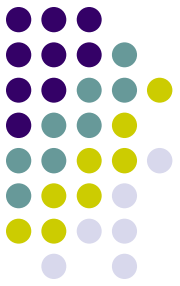
I. PENDAHULUAN



Relevansi Pembangunan Wilayah

- **memberi perlindungan sosial dan ekonomi sebagai akibat dari kemiskinan dan ketimpangan; serta tekanan sumberdaya alam**
- **menyediakan media bagi beroperasinya mekanisme pasar secara adil (*in the same playing field*) dan lestari (*sustainable*).**
- **Konsep/kerangka berpikir/metodologi bagi perencanaan pembangunan.**
- **upaya-upaya pembangunan sistem kelembagaan**

I. PENDAHULUAN



Arti Wilayah

- **sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan**
- ***transport cost*, setara dengan tingkat bunga dalam dimensi waktu**
- **relevan dg geografis Indonesia yang luas, berat, terpisah oleh lautan, dan terpencil**



II. PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

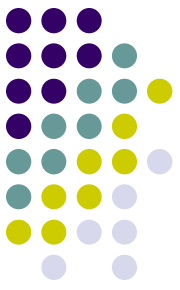


Perencanaan

- **Pengertian:** upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praksis (praktek-praktek yang dilandasi teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik.
- **Model perencanaan:** (i) konsistensi (persamaan simultan), (ii) optimisasi (*linear programming*) dan (iii) simulasi (sistem ekonomi), serta (iv) modifikasi
- **Sifat:** (i) perspektif (bukan deskriptif/eksplanatif), (ii) futuristik (resiko dan uncertainty), dan (iii) antisipatif (penyelesaian thd fenomena yang akan dihadapi).
- **Tradisi:** (i) *policy analysis tradition*, (ii) *social reform tradition*, (iii) *social learning tradition*, (iv) *social mobilization tradition*.



II. PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH



Pembangunan

Suatu upaya ter*koordinasi* untuk *menciptakan alternatif* yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai *aspirasinya* yang paling manusiawi.

Wilayah

- Pengertian: suatu area geografis yang memiliki ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi.
- Batasan wilayah hanya mencakup seluas lingkungan perkotaan (*core*) dan area sekelilingnya (*periphery*).

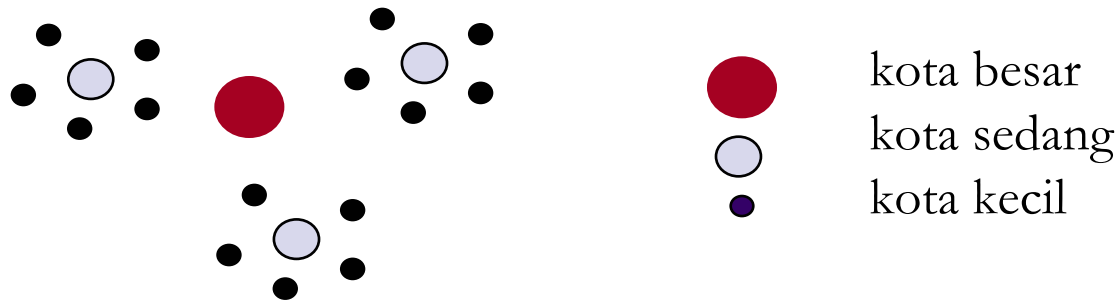


II. PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH



Ada tiga tipe Wilayah

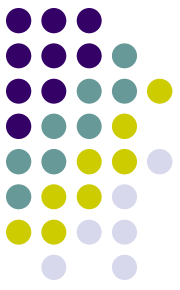
- **Wilayah fungsional (*functional region*)**, dicirikan oleh adanya derajat integrasi antara komponen-komponen dalam wilayah.



- **Wilayah homogen**, dicirikan oleh adanya relatif kesamaan (*similarity*) dalam wilayah.
- **Wilayah administratif**, dibentuk untuk kepentingan pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.



II. PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

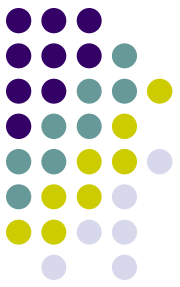


Perencanaan Pembangunan Wilayah

- Suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan
- Tiga pilar penting (i) keunggulan komparatif (*imperfect mobility of factor*), (ii) aglomerasi (*imperfect divisibility*). (iii) *transport cost* atau *imperfect mobility of good and services*.



II. PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH



Pengambilan Keputusan Atas Dasar Lokasi Secara Langsung (*locational factors*)

- Inersia.
- Transport cost. (i) *market material site* (ii) *Ubiquity*, (iii) *Ideal weight input-output*, (iv) *End point location* (v) *Transshipment*
- Labor Cost.

Secara tidak langsung (*non-locational factors*).

- Kebijakan pemerintah.
- Keadaan lingkungan dan sosial.
- Iklim dan stabilisasi politik.



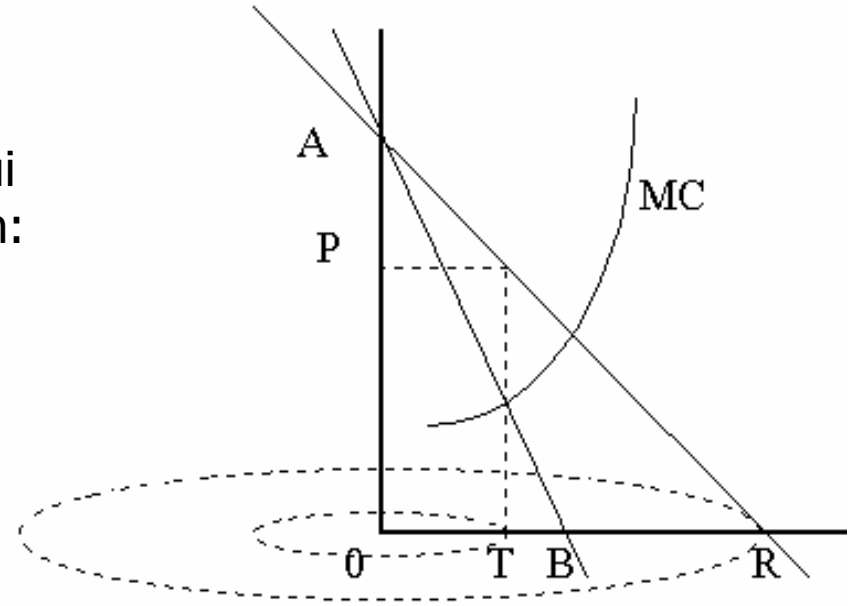
III. WILAYAH PASAR dan SISTEM PERKOTAAN



Wilayah Pasar (*market area*)

1. Model monopolis; menggambarkan permintaan secara spasial digambarkan melalui kurva *demand cone*. asumsi-asumsi antara lain:

- Hanya ada satu komoditi.
- kepadatan penduduk menyebar rata.
- Pendapatan seragam.
- Fisik wilayah homogen sehingga setiap individu bebas bergerak ke mana saja.
- Hanya ada satu jenis alat transport (*mode of transport*).

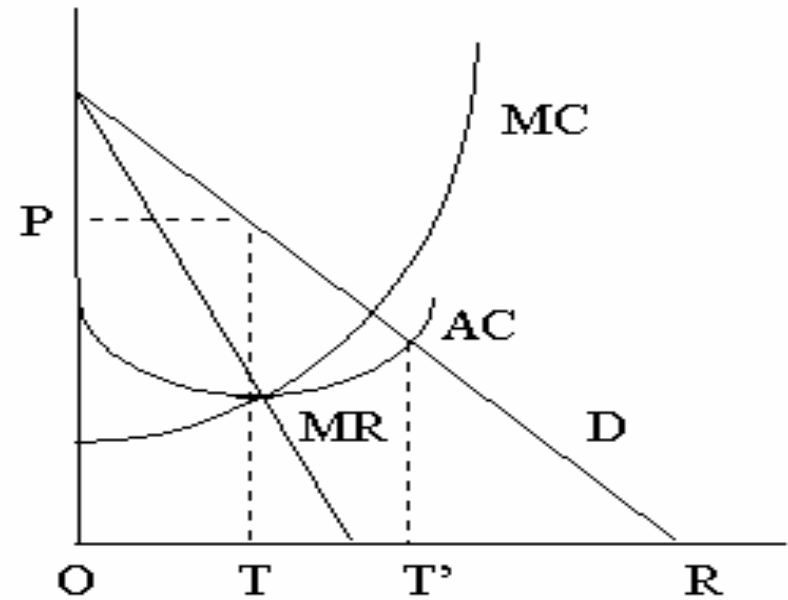
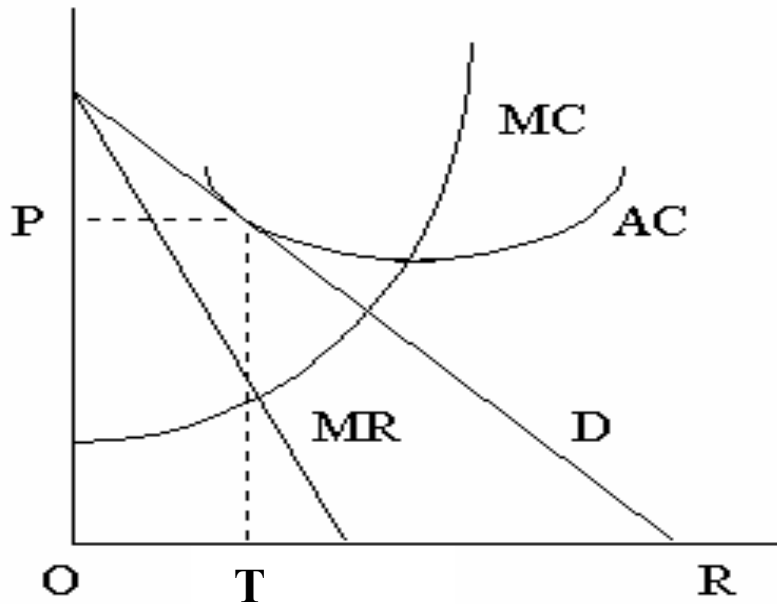


Struktur produksi monopolis, permintaan konsumen dan *demand cone*

Informasi penting

1. terbentuk *demand cone* yang dengan tinggi OA dan berjari-jari OR. kurva AR menggambarkan jumlah barang yang dibeli konsumen
2. terbentuk wilayah pasar lingkaran bulat yang berjari-jari sejauh OR.
3. Wilayah pasar terbagi menjadi dua; (i) *Threshold*, berjari-jari OT, produsen mendapatkan sedikitnya keuntungan normal untuk menutupi biaya operasionalnya; (ii) *range*, jari-2 OR, wilayah pasar dimana konsumen berhadapan dengan ongkos angkut yang tinggi untuk memperoleh komoditi.





Kedudukan *average cost* dan luas wilayah pasar

- **Kurva AC sama dengan P (kiri)**, besarnya penerimaan (*revenue*) hanya untuk menutup biaya (*break-even quantity*). Implikasinya produsen hanya mampu beroperasi di dalam wilayah *threshold* sejauh OT,
- **Kurva AC sama dengan MC dan MR (kanan)**. besarnya penerimaan (*revenue*) memberikan keuntungan berlebih (*excess profit*). produsen dapat memperlus operasi hingga sejauh OT', lebih jauh dari T' produsen akan mengalami kerugian.

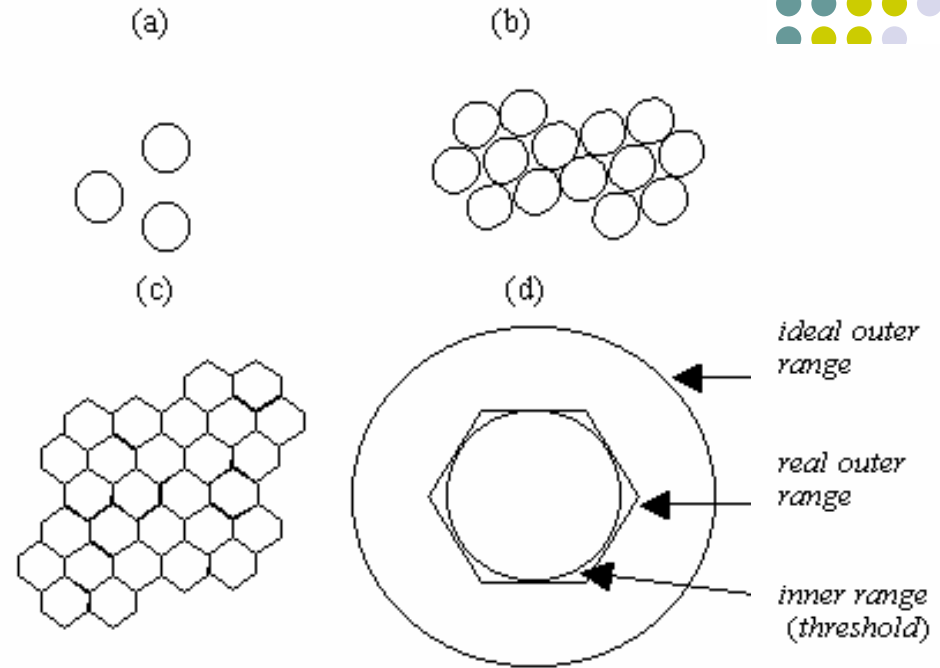


III. WILAYAH PASAR dan SISTEM PERKOTAAN



2. Model kompetisi monopolis

- *inner range*, -- sama dengan *threshold* (gb d). produsen menempatkan *average cost*, *average revenue* dan harga pada tingkat yang sama.
- *ideal outer range* adalah jarak maksimum yang harus dihadapi oleh konsumen untuk membeli suatu produk pada *average cost*. besaran ongkos angkut sangat signifikan tinggi sehingga permintaan sama dengan nol.
- *real outer range*, adalah konsekwensi dari mekanisme kompetisi di antara monopolis, mencerminkan wilayah pasar aktual bagi seorang produsen. mungkin saja berhimpit dengan *threshold*. produsen beroperasi menghasilkan keuntungan hanya pada tingkat normal.



Bentuk wilayah pasar monopolis dan kompetisi



III. WILAYAH PASAR dan SISTEM PERKOTAAN



Luas wilayah pasar (mengacu *threshold*)

- satuan jumlah produksi, misal 5000 unit barang.
- tingkat konsumsi, misal 10 pakaian per orang per tahun.
- *threshold populasi*, misal 5000 orang per tahun (50000 dibagi 10).
- *threshold* luas lahan, 500 hektar (50000 rumah dikali 100 meter persegi).
- *threshold* tempat ibadah, bisnis eceran, toko atau warung makanan atau kebutuhan pokok, atau restoran <<< *threshold* rumah sakit, akuntan publik, calo (*makelar*), bank, atau taxi.
- **Leonard W Weiss**, mendefinisikan wilayah pasar sebagai radius dari pabrik sejauh mana sebesar delapan puluh persen produk yang bersangkutan didistribusikan, misalnya rokok 1108 mil, pupuk 828 mil, sabun (572 mil), es krim (158 mil) dan soft drink (68 mil).
- **Berry and Garrison**, merumuskannya sebagai jumlah (kapasitas) individu minimal agar kegiatan ekonomi dapat berfungsi, misalnya rumah sakit (1159 orang), taxi (762 orang), *furniture* (542 orang), balai pertemuan (525 orang), sekolah dasar (322 orang), dan pompa bensin (196 orang) (Blair, 1981; 80-81).





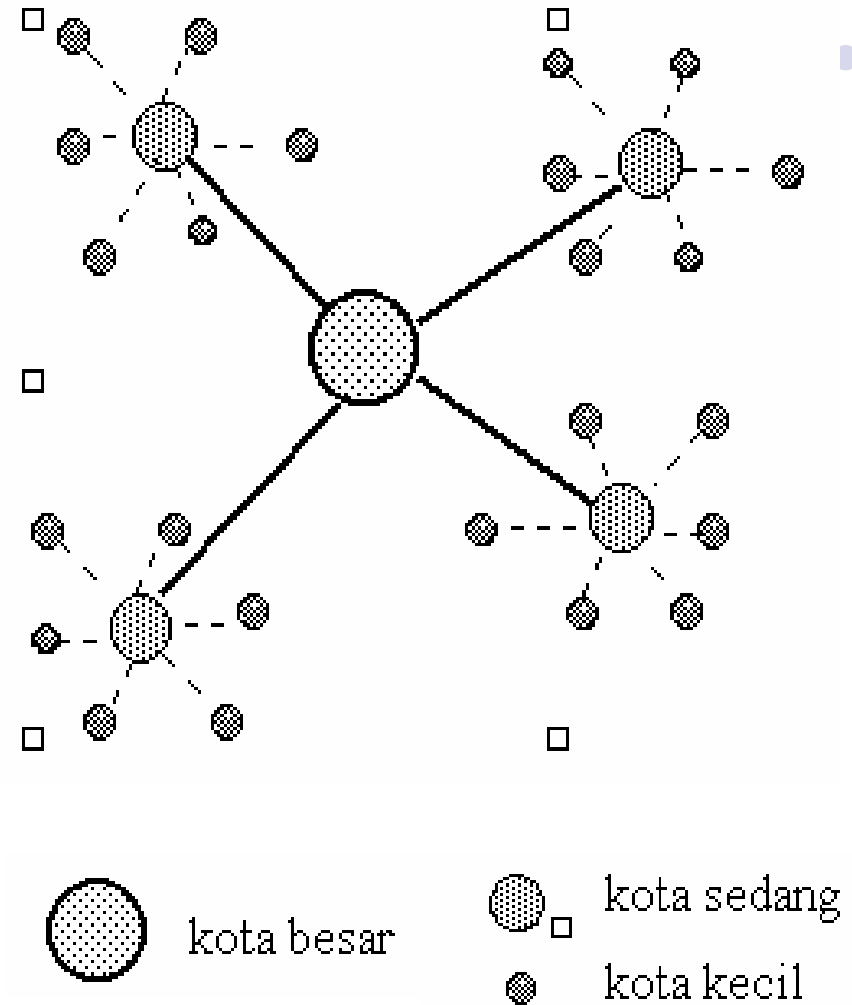
FAKTOR-2 mempengaruhi wilayah pasar

- **Skala ekonomi (*economic of scale*).** Produsen dg *average cost* menurun akan ekspansi untuk mencapai keuntungan optimal, misal Jenis produk berteknologi tinggi
- **permintaan total spasial (*demand density*).** *Demand density* = perkalian antara permintaan individu dengan kepadatan penduduk. Semakin tinggi permintaan dapat menarik lebih banyak produsen, sehingga wilayah pasar masing-masing produsen menyempit.
- **ongkos angkut (*transport cost*),** bersifat mendua (*ambiguous*). Katakan ongkos angkut turun, **Satu**, masih dlm skala ekonomi, produsen umumnya mengimbangi dengan perluasan pasar. **Dua**, berbarengan kenaikan biaya produksi, maka produsen cenderung meningkatkan profit pada jangka pendek, sehingga memancing masuknya pesaing dan wilayah pasar bertambah sempit (*crowded*).
- **faktor jumlah penduduk,** kenaikan tingkat konsumsi dan *income* bisa memicu bertambahnya produsen dan mempersempit wilayah pasar. Tetapi bisa saja berbalik akibat perbaikan teknologi yang mengindikasikan *economic of scale*.



Karakter Sistem Perkotaan

- Aglomerasi: bertemunya berbagai aktivitas ekonomi yang berbeda
- Mekanisme yang kompleks dalam permintaan vs penawaran
- Terbentuk hirarki layanan: pusat melayani hinterland secara dinamik mengikuti perubahan teknologi, investasi dan infrastruktur, oertumbuhan ekonomi
- berkembangnya ruang pasar homogen sektor jasa, misal pusat perbelanjaan



Hirarki dan sistem perkotaan



Ukuran Wilayah Pasar



- **Metode Survei:** TV coverage, telephone call, sebaran dan oplah surat kabar
- **Metode gravitasi**

$$Sh^a = D_{ab} / [1 + (P_b/P_a)^{1/2}]$$

dimana Sh^a : jarak antara kota A terhadap *hinterlandnya*

D_{ab} : jarak antara kota A dan B

P_a, P_b : populasi kota A dan B

- **Metode *cluster***

$$L_{mn} = \frac{2 \times (S_{mn} + S_{nm})}{(E_m + E_n + I_m + I_n)}$$

dimana L_{mn} = Indeks standart

S_{mn} = aliran perdagangan dari wilayah m ke n

S_{nm} = aliran perdagangan dari wilayah n ke m

E_m = total ekspor dari m

E_n = total ekspor dari n

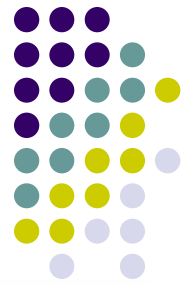
I_m = total impor dari m

I_n = total impor dari n

m, n=wilayah



Ukuran Wilayah Pasar: metode cluster



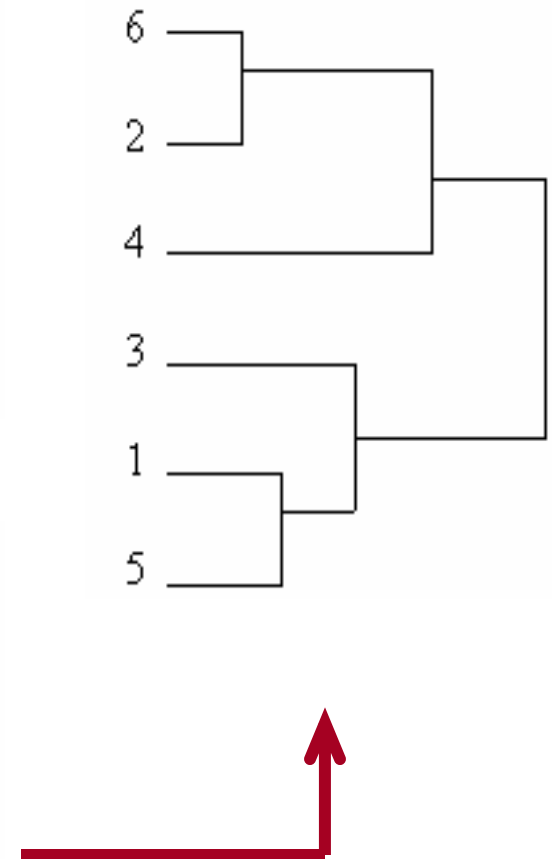
Aliran Perdagangan Antara Enam Wilayah

Dari	Menuju Wilayah						Total
	1	2	3	4	5	6	
Wilayah 1	-	30	40	40	90	20	220
Wilayah 2	10	-	10	50	40	50	160
Wilayah 3	80	10	-	40	20	10	160
Wilayah 4	20	60	30	-	25	25	160
Wilayah 5	60	50	60	60	-	20	250
Wilayah 6	10	70	20	20	30	-	150
Total	180	220	160	210	205	125	

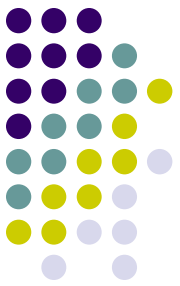


Indeks Standar Perdagangan Diantara 6 Area Contoh

Dari	Menuju Wilayah						Total
	1	2	3	4	5	6	
Wilayah 1							
Wilayah 2	0.103						
Wilayah 3	0.333	0.057					
Wilayah 4	0.156	0.293	0.203				
Wilayah 5	0.351	0.216	0.206	0.206			
Wilayah 6	0.089	0.366	0.101	0.104	0.137		



Ukuran Wilayah Pasar: metode cluster



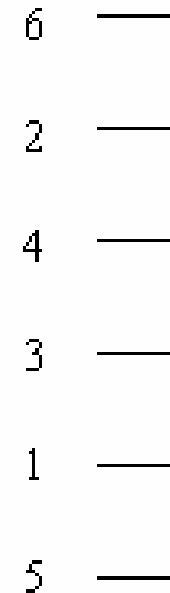
Aliran Perdagangan Antara Enam Wilayah

Dari	Menuju Wilayah						Total
	1	2	3	4	5	6	
Wilayah 1	-	10	10	10	10	10	100
Wilayah 2	10	-	10	10	10	10	100
Wilayah 3	10	10	-	10	10	10	100
Wilayah 4	10	10	10	-	10	10	100
Wilayah 5	10	10	10	10	-	10	100
Wilayah 6	10	10	10	10	10	-	100
Total	100	100	100	100	100	100	

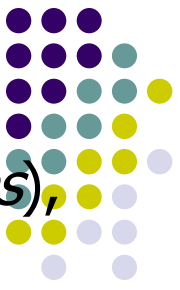


Indeks Standar Perdagangan Diantara 6 Area Contoh

Dari	Menuju Wilayah						Total
	1	2	3	4	5	6	
Wilayah 1							
Wilayah 2	0.200						
Wilayah 3	0.200	0.200					
Wilayah 4	0.200	0.200	0.200				
Wilayah 5	0.200	0.200	0.200	0.200			
Wilayah 6	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200		

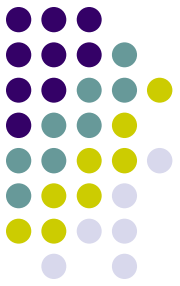


IV. AGLOMERASI



- ekonomi aglomerasi internal (*internal agglomeration economies*), mengacu penurunan rata-rata biaya akibat ekspansi spasial dibanding peningkatan output.
- keterkaitan antar industri (*interindustry linkages*), penurunan biaya rata-rata karena dekat industri *supplier*/konsumen, kebelakang (*backward linkage*) dan kaitan ke depan (*forward linkage*),
- ekonomi lokalisasi (*localization economies*). masuknya suatu perusahaan (sejenis) dalam lokasi yang sama yang memiliki nilai lebih dan ditunggu-2 oleh industri, karena memiliki tenaga kerja trampil, Teknologi yang spesifik (pemadam kebakaran, pengolah limbah dll), Faktor-faktor inovasi, imitasi, dan modifikasi, Pilihan tujuan belanja (*shopping centre*)
- ekonomi urbanisasi (*urbanization economies*). Tipe paling kompleks dan kabur (*diffuse*) yang terjadi/membentuk perkotaan melalui dukungan Sistem infrastruktur, *division of labor*, skala ekonomi internal perusahaan (*internal economies*), proses transaksi secara optimum dan random, institusi yang efisien

IV. AGLOMERASI



Analisis

Koefisien lokasi (*location quotient* atau **LQ**).

$$LQ = \frac{(e_i / e_t)}{(N_i / N_t)} ;$$

e_i : jumlah pekerja di sektor industri i dalam wilayah
 e_t : jumlah pekerja total dalam wilayah
 N_i : jumlah pekerja di sektor industri i secara nasional
 N_t : jumlah pekerja total secara nasional

- $LQ > 1$, terjadi relatif konsentrasi, dapat mengindikasikan tentang potensi ekspor dan keunggulan komparatif wilayah
- $LQ = 1$, berarti *share* wilayah tidak berbeda dengan nasional, tidak menunjukkan adanya konsentrasi industri.
- $LQ < 1$, mengindikasikan tidak ada keunggulan komparatif wilayah



V. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN WILAYAH



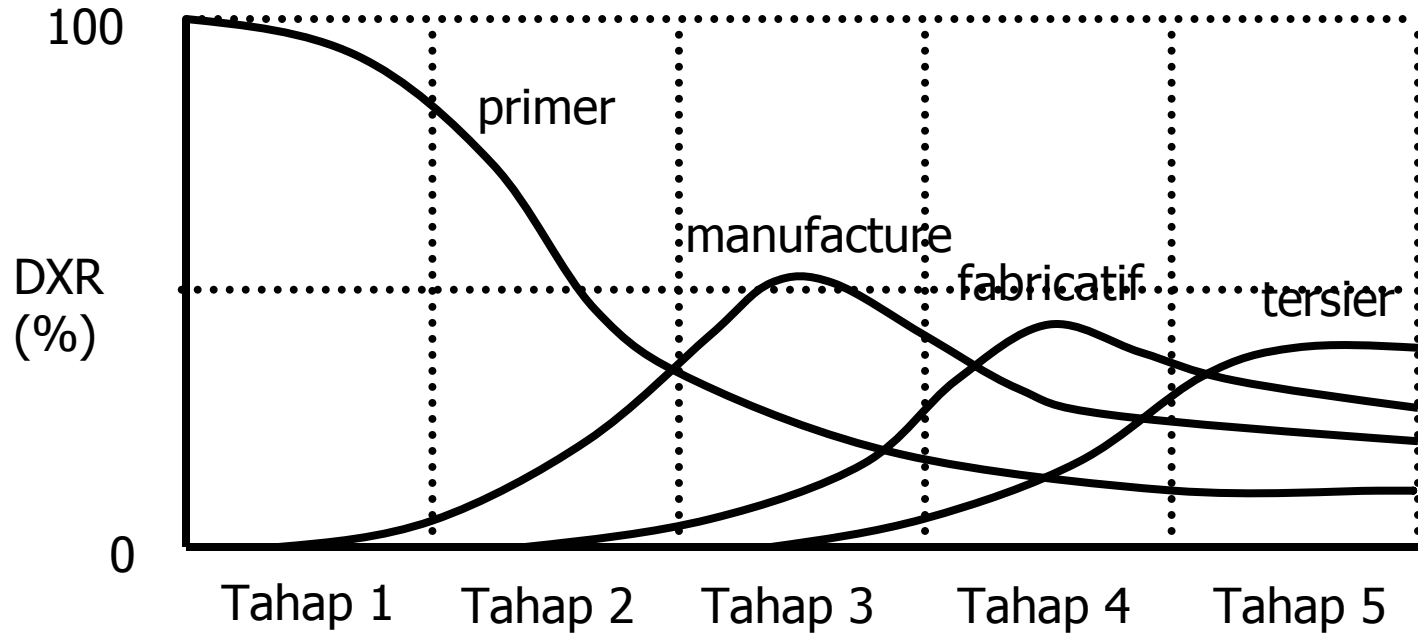
Proses kontinyu hasil pembangunan/transformatasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni

- primer (pertanian, kehutanan, perikanan)
- sekunder (pertambangan, manufaktur, konstruksi, publik utilities)
- tersier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa)

LIMA TAHAP PERTUMBUHAN (THOMPSON, 1965)

1. spesialisasi ekspor (*export specialization*): adanya industri yang dominan. antara lain, minyak, hasil perkebunan dan pertanian, dan produk-produk primer lainnya.
2. ekspor kompleks (*export complex*): ADANYA ekspor selain komoditi dominan (*backward and forward linkage industry*).
3. kematangan ekonomi (*economic maturation*). ADANYA diversifikasi industri, substitusi impor, kemandirian wilayah.
4. pembentukan metropolis (*regional metropolis*); adanya pusat kegiatan ekonomi wilayah untuk melayani *hinterland*; aktivitas ekonomi ekspor dan impor

V. PERTUMB DAN PERKEMBANGAN WILAYAH



Perkembangan sektor ekspor dominan (DXS) (Parr, 1999)

5. kemajuan teknis dan profesional (*technical-professional virtuosity*); adanya proses produksi yang canggih dan baru, efisien dan terspesialisasi. Sistem ekonomi menjadi kompleks (inovasi, modifikasi dan imitasi)



V. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN WILAYAH



Pendekatan empirik (perspektif sejarah)

- **Fenomena *core-periphery*.** terbentuknya wilayah fungsional yang berciri ketergantungan antara kota dan *hinterland*, misal Jakarta-Bangkok-Tokyo (Jepang), Mexico City-New York.(USA)
- **Periode industrialisasi.** lahirnya industri manufaktur dalam produksi nasional
- **Periode modern (*post industrial era*).** Adanya spesialisasinya sektor-sektor jasa karena ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan mekanisme pasar, sistem kelembagaan, faktor-faktor budaya dan permintaan sosial (*cultural and amenity based*).
- **Kota-kota di negara sedang berkembang.** Fenomena Jakarta, New Delhi, Dacca, Mexico City, dan Manila Kombinasi sektor (jasa) modern, manufaktur berat, dan usaha-usaha informal

V. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN WILAYAH



Pendekatan Penawaran (*supply side approach*)

$$Q = f(f_1, f_2, f_3, \dots, f_n)$$

Q : produksi ekonomi wilayah

$f_1, f_2, f_3, \dots, f_n$: faktor *local supply* yang mempengaruhi produktivitas wilayah, antara lain:

- Kapital atau modal.
- Lahan.
- Tenaga kerja.
- Kewirausahaan (*entrepreneurship*).
- Input antara (*intermediate input*).

Pendekatan Permintaan

permintaan ekspor akan menggerakkan potensi dan sistem produksi dan pertumbuhan ekonomi wilayah (teori pertumbuhan *export base*).

V. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN WILAYAH



Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Wilayah

1. Analisis shift-share

$$\Delta e_i = e_i \left(\frac{N^*}{N} - 1 \right) + e_i \left(\frac{N_i^*}{N_i} - \frac{N^*}{N} \right) + e_i \left(\frac{e_i^*}{e_i} - \frac{N_i^*}{N_i} \right)$$

dimana Δe_i : perubahan jumlah tenaga kerja dalam industri i

e_i : jumlah tenaga kerja wilayah industri i pada awal periode

e_i^* : jumlah tenaga kerja wilayah industri i pada akhir periode

N^* : total tenaga kerja nasional pada akhir periode

N : total tenaga kerja nasional pada awal periode

N_i^* : total tenaga kerja nasional industri i pada akhir periode

N_i : total tenaga kerja nasional industri i pada awal periode

share : perubahan tenaga kerja mengikuti perubahan di tingkat nasional.

mix : relatif kecepatan tumbuh suatu sektor dalam wilayah dibanding nasional.

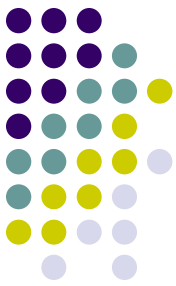
competitif : relatif dukungan lingkungan suatu sektor di dalam wilayah dibanding nasional.

2. Analisis input-output

3. Pendekatan *social accounting matrices*

4. Pendekatan Ekonometrika

Analisis *shift-share* tenaga kerja di Jawa Timur



Sektor	Jatim		Nasional	
	1990	1994	1990	1994
Pertanian	8747079	7545387	42378309	37857499
Industri	1602425	2339556	7693263	10840195
Dagang	2301642	2876006	11067357	13967234
Jasa	81881	132174	478380	623899
Total Pekerja	12733027	12893123	61617309	63288827
Perubahan Total	160096		1671518	
<i>Shift-Share Analysis</i>	<i>Share</i>	<i>Mix</i>	<i>Competitif</i>	<i>Total</i>
Pertanian	237286	-1170402	-268576	-1201692
Industri	43470	612003	81658	737131
Dagang	62438	540640	-28714	574364
Jasa	2221	22686	25386	50293
Total Pekerja	345414	4928	-190246	160096

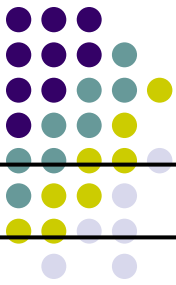
Keterangan:
Total share 345414 orang merupakan tambahan kenaikan 2.7 persen dari total pekerja Jawa Timur pada tahun 1990. Perubahan tenaga kerja mengikuti tingkat nasional. sebesar 2.7 persen dibanding tahun 1990.

Sumber: BPS (1990; 1994a)

Total mix positif menunjukkan kecepatan tumbuh ekonomi Jawa Timur lebih tinggi dibanding nasional

Total kompetitif negatif memperlihatkan Jawa Timur kurang kondusif bagi perekonomian dibanding nasional. Kolom *kompetitif* dapat mengidentifikasi sektor-sektor potensial di masa akan datang

VI. PEMBANGUNAN EKONOMI



Tahun	Kebijakan	Keputusan Politik Penting
1945 - 1949	Mempertahankan kemerdekaan	Perundingan-perundingan dengan Belanda untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan
1950 - 1960	Pembangunan infrastruktur politik	Penataan lembaga-lembaga politik secara demokratis melalui Pemilu 1955 dan parlemen
1961 - 1966	Pembangunan terkomando	Pengambilan keputusan politik dan kenegaraan oleh Presiden dengan kewenangan yang sangat besar
1967 - 1980	Pembangunan ekonomi stabilisasi	Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas; irigasi, transmigrasi, perkreditan; menuju swasembada pangan. Konsep pembangunan terencana (Repelita)
1981 - 1987	Proteksi dan industrialisasi	Kebijakan bernuansa KKN dlm industri kehutan+kebunan, ind berat, kimia dan infrastruktur dan hulu lainnya.
1988 - 1997	Liberalisasi ekonomi	Pakto 1988 tentang liberalisasi sektor perbankan Liberaliasi perdagangan global (WTO, 1995)
1997 - 1998	Vakum, dilanda krisis ekonomi	Kesepakatan dengan IMF untuk merestrukturisasi perekonomian dan penanggulangan dampak krisis ekonomi
1999 - sekarang	Pembangunan demokrasi, otonomi daerah, dan hak asasi manusia (HAM)	Pemilu 1999 secara demokratis UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Peradilan HAM, penyelesaian kasus-kasus perburuhan



VI. PEMBANGUNAN EKONOMI



- ✓ Kebijakan adalah pendekatan untuk menangkap isu-isu yang lebih spesifik dalam rangka merealisasikan tujuan atau sasaran pembangunan.
- ✓ Program merupakan rumusan implementasi dari kebijakan pembangunan yang beroperasi lebih spesifik di setiap wilayah.

Tiga motivasi Pembangunan

- meningkatkan kesempatan kerja (*job creation*).
- memperbaiki fiskal (*fiscal improvement*).
- pembangunan daerah miskin.

Kebijakan Subsidi

- Pemotongan atau pembebasan pajak (*tax abatement*)
- Pembebasan pajak pembeayaan (*tax-exempt financing*)
- Bantuan pinjaman (*loan assistance*)
- Bantuan infrastruktur (*infrastructure assistance*)
- Penguasaan aset yang merugikan (*write down*)

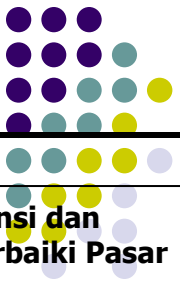
VI. PEMBANGUNAN EKONOMI



Program Pembangunan

- Program pelatihan dan kemitraan (*job training and partnership*)
- Inkubator
- Penataan ruang bisnis (*enterprise zone*)
- Zone perdagangan bebas (*free trade zone*)
- Pembangunan perkotaan (*urban development*)
- Pengembangan masyarakat

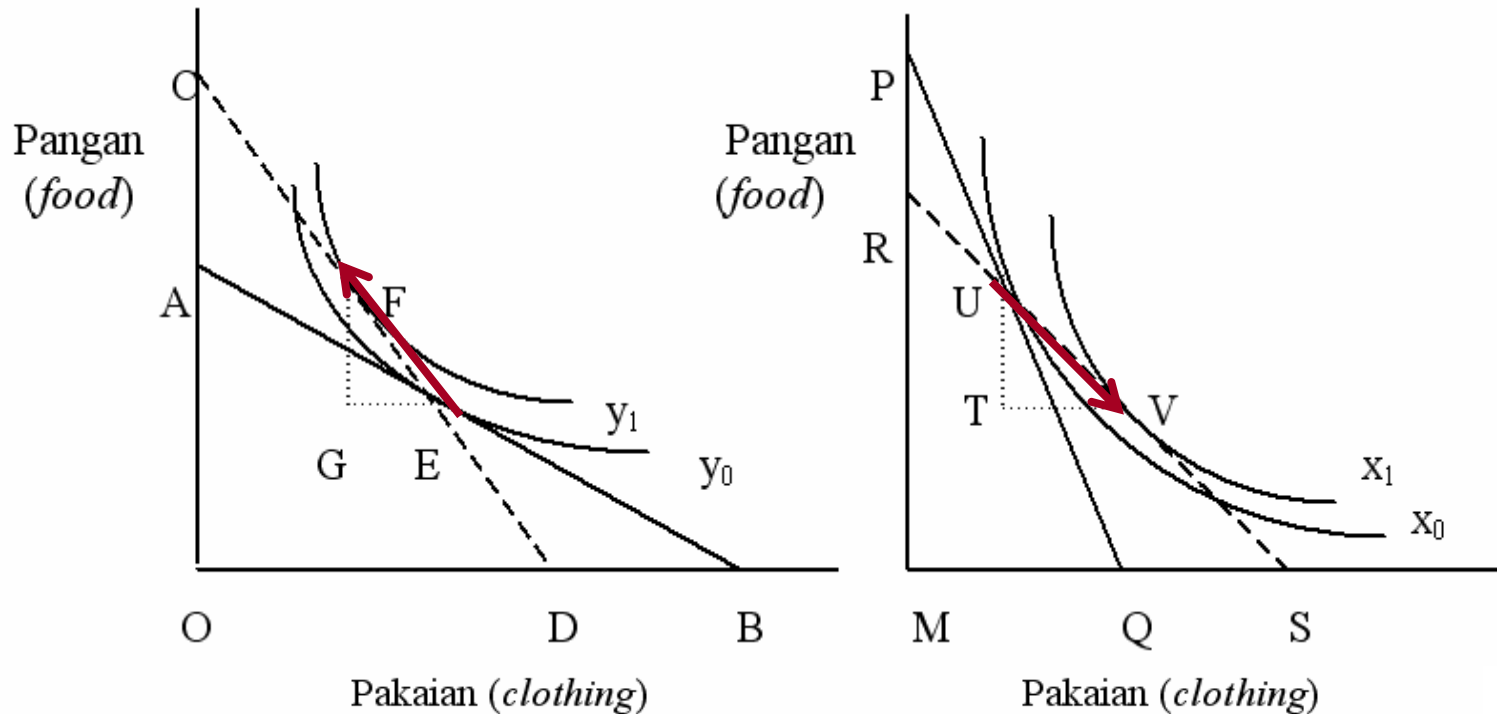




Klasifikasi Kebijakan dan Program Subsidi

Sektor	Jenis Kebijakan Subsidi					
	Subsidi Langsung	Subsidi Tidak Langsung	Informasi dan Anjuran	Peraturan dan Pengendalian	Mempengaruhi Kelembagaan	Intervensi dan Memperbaiki Pasar
Keuangan	Insentif	Pemotongan pajak	Informasi finansial	Peraturan audit, insurance, kepailitan	Peraturan perbankan, stock exchange	Kontrol resiko finansial, pasar uang, <i>stock exchange</i>
Sumberdaya Manusia	Gaji pegawai, pelatihan karyawan	<i>Job training</i>	<i>Job counseling</i> , pelayanan	Aturan perburuhan	Peraturan kelembagaan pendidikan	Kontrol labor market, pendidikan
Lahan dan Bangunan	Subsidi lahan	Subsidi infrastruktur	Informasi pengembangan lahan	Penataan Ruang	Peraturan real estate & kelayakan bangunan	Kebijakan ruang perkotaan, kawasan industri
Teknologi	Insentif bagi R & D	Kegiatan statistika ekonomi	Transfer teknologi dan pengembangan industri	Paten, standar industri, HAKI	Pembangunan jaringan komunikasi antar industri	Dukungan terhadap penelitian dasar
Produksi dan Operasi	Subsidi bahan mentah, atau pada produsen lokal	Pelayanan publik: kepolisian, pemadam kebakaran	Pengenalan metode produksi baru	Aturan <i>labelling</i> , perlindungan konsumen	Dukungan prasarana transport dan telekomunikasi	
Pemasaran	Pelayanan kepada masyarakat kota	Orientasi ekspor, penjualan untuk masyarakat kota	Promosi substitusi impor dan produksi ekspor	Perlindungan <i>externalities</i> , dan monitoring	Kerjasama asosiasi dan pemain pasar	Penguatan pasar produk lokal
Motivasi	Lingkungan yang kondusif (<i>goodwill</i>)	pemotongan pajak penghasilan	Sosialisasi dan kampanye	Perlindungan publik (<i>public safety</i>)	Membangun kelembagaan lingkungan lokal	Mengembangkan kenyamanan lingkungan
Aktivitas Bersama	Paket insentif	<i>Incubators</i>	Komisi publik, informasi bisnis, <i>ombudsmen</i>	Aturan <i>streamlining</i> , kawasan industri		Penegakan hukum (<i>adjudication</i>)

VII. ALIRAN KOMODITI DAN SUMBERDAYA

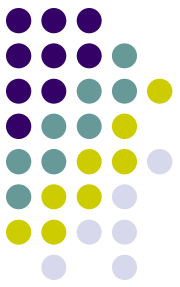


Segitiga perdagangan yang dinikmati negara sendiri (kiri) dan negara lain (kanan) (Caves and Jones, 1981; p. 19-21)

Teori Heckser Ohlin

Aliran komoditi disebabkan adanya perbedaan rasio harga (*relative price*) antara dua negara yang memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya pangan dan pakaian (*two countries and two commodity model*).

VII. ALIRAN KOMODITI DAN SUMBERDAYA



Asumsi Model Heckscher-Ohlin

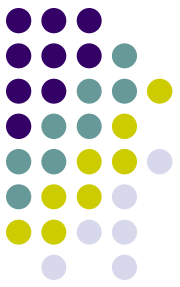
- **Pertama**, tidak ada *transport cost*
- **Kedua**, tidak ada proteksi misalnya melalui tarif, pajak atau pembatasan lainnya--akan mengganggu aliran sumberdaya.
- **Ketiga**, model kurang akurat untuk fenomena jangka pendek (*short run*)

Migrasi

- model *equilibrium*, karena faktor-faktor alami tanpa disertai perubahan demografi yang menyolok. misal melanjutkan sekolah, promosi jabatan, pensiunan pulang kampung
- Model *disequilibrium*. akibat disparitas dalam pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, terjadi mekanisme *push* dan *pull*. Didorong *wage factor*.



VII. ALIRAN KOMODITI DAN SUMBERDAYA



Model-model migrasi:

1. Model Haris Todaro,

Peluang berkerja (PE) adalah $PE = 1 - U$; dimana U adalah tingkat pengangguran. Bila mana tingkat upah di kota 5 juta rupiah per tahun, dan pengangguran 20 persen, maka peluang bekerja 80 persen dan tingkat harapan upah adalah 4 juta rupiah (dari 5 juta kali 80 %). bila upah penduduk luar kota < 4 juta, maka ia memutuskan pindah ke kota.

2. Model Gravitasi (*gravity model*)

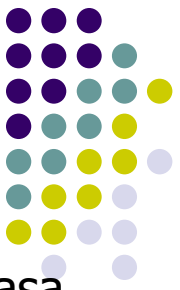
$$M_{ab} = \frac{g P_a P_b (W_b - W_a)}{(D_{ab})^2}$$

dimana
 M_{ab} : peluang terjado migrasi
 $(P_a \cdot P_b)$: perbedaan jumlah penduduk
 $(W_b - W_a)$: perbedaan upah
 D_{ab} : jarak

3. Pengaruh dorong bergelombang (*beaten-path effect*)

Proses migrasi didahului seorang pionir, sesudah itu saudara, tetangga, teman atau famili mengikutinya. Pionir memberinya pekerjaan, tumpangan hidup atau bantuan lainnya, sehingga dapat menekan biaya relokasi, ketidak menentuan dan biaya-beaya sosial (*social cost*).

VII. ALIRAN KOMODITI DAN SUMBERDAYA



Mobilitas modal (*capital mobility*)

- modal dalam bentuk uang (*money capital*), mengikuti aliran barang dan jasa atau investasi.
- modal dalam bentuk aset fisik, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah relatif terbatas, disebut juga real capital karena merupakan faktor dasar (*place-bound*) dalam sistem produksi, seperti bangunan dan mesin.
- modal dalam bentuk fisik yang tidak dapat dipindahkan, karena nilainya menurun drastis dan tidak mampu diambil manfaatnya sedikitpun (memiliki *demolition cost*, misalnya pengaruh kontaminasi atau kadaluarsa)

Faktor positif/pendukung aliran modal

- infrastruktur,
- perekonomian yang kondusif,
- pengalaman (sejarah) investasi yang menyenangkan.

Faktor positif/pendukung aliran modal

- faktor non ekonomi; stabilitas politik, kriminal, *race discrimination*, dan *law enforcement*
- perilaku monopoli, oligopoli, atau individual yang tidak fair
- tingginya biaya transaksi (*transaction cost*), jarak, informasi tidak transparan (*asymmetric information*), dan kesulitan akses, resiko dan *uncertainty*

VII. ALIRAN KOMODITI DAN SUMBERDAYA



Aliran Gagasan dan Inovasi

Gagasan : cara atau pemikiran baru ttg sesuatu yg sedang dikerjakan.

Inovasi: penerapan ekonomi (atau secara ekonomi) dari suatu gagasan.

Termasuk kegiatan ikutannya seperti menirukan atau modifikasi,

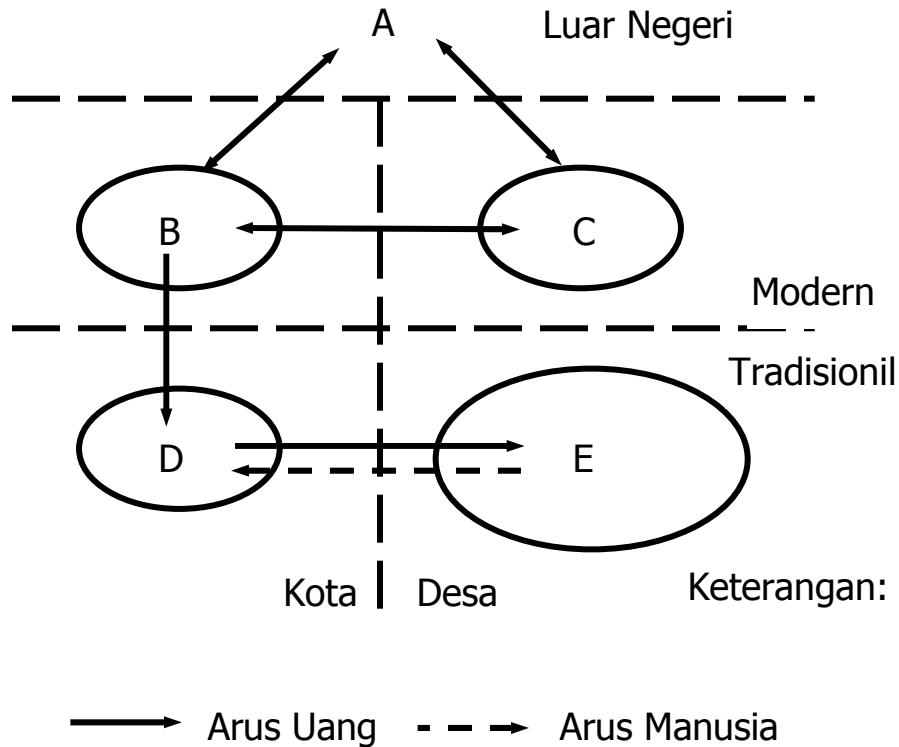
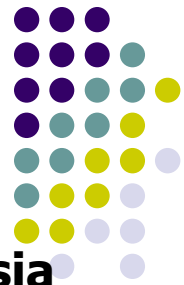
Karakteristik/implikasi Aliran Gagasan dan Inovasi

- Efisien: tidak memerlukan biaya dalam proses transfernya.
- Efektif??? Segera tersebar dan diterima
- Penyebaran: (i) Mengalir radial-yang berdekatan, (ii) lateral sesama hirarki, (iii) internal dalam hirarki
- *industrial filtering*: kota metropolitan sebagai pembuat inovasi dan rekayasa teknologi pd tahap awal. Ketika teknologi dari inovasi sudah dipahami, sdh menjadi rutin, dan pasar sdh stabil, maka proses produksi mulai bergeser ke kota-kota yang berukuran lebih kecil

Mengapa dengan Kota Metropolitan

- Faktor permintaan: (i) inovasi segera direspon sangat tinggi; (ii) tingkat aglomerasi sangat tinggi
- Faktor suplai. dukungan PT, telekomunikasi, pakar rekayasa, laboratorium iptek, *lawyer*, perusahaan pemasaran, intermediate manufacturers, dan jaringan profesional.

VII. ALIRAN KOMODITI DAN SUMBERDAYA



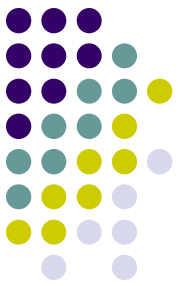
Skema umum migrasi di Indonesia (Azis, 1994)

Fenomena migrasi di Indonesia

1. Aliran manfaat (dalam arus uang) secara intensif terjadi di sektor modern A, B dan C.
2. D adalah kelompok masyarakat dalam beragam aktifitas informal (*self-employed*), yang menerima tetesan manfaat dari B.
3. Secara tradisionil, kiriman manfaat dilanjutkan ke kerabatnya di pedesaan (E).
4. D merupakan potret yang memuat harapan dan cahaya (*pull factor*) bagi penduduk di E. Didorong oleh *push factor* yakni memburuknya keadaan di desa, dimulailah gejala dan proses umum urbanisasi.



VIII. PENGGUNAAN LAHAN



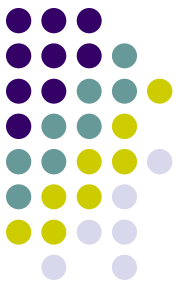
Konsepsi Land rent dan Land use

Land rent merupakan residual (*private profit*) dari perolehan-perolehan ekonomi penggunaan lahan sesudah dikurangi biaya konstruksi dan operasi. LR dihitung per tahun dengan discount faktor i ($LR = R/i$)

Perolehan ekonomi dihasilkan dari aset-2 seperti:

- Fisik: Kesuburan tanah dan lokasi (Ricardian rent)
- Non fisik:
 - (i) kenyamanan lingkungan, kebersihan udara, konservasi tanah, nilai terumbu karang dan aset lingkungan lainnya;
 - (ii) kelembagaan (institutional rent), kepemilikan tanah.
 - (iii) rent sosial, rumah di Pondok Indah (Jakarta), di Manyar (Surabaya) jalan Ijen (Malang).
 - (iv) rent politik, tanah bengkok, dekat perumahan pejabat negara

VIII. PENGGUNAAN LAHAN



Model Klasik (Ricardo dan von Thunen), dg asumsi:

- terdapat satu pusat pasar (*central bussines district*, CBD) yang dikelilingi oleh wilayah produksi pertanian,
- tingkat kesuburan tanah seragam dg permukaan tanah mendatar
- setiap rumah tangga mempunyai akses informasi, alat transportasi dan tingkat mobilitas yang sama
- harga faktor *non-land* kompetitif

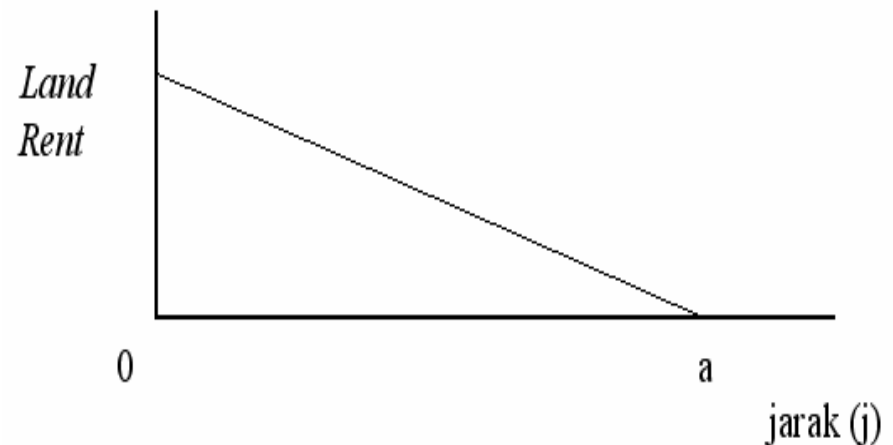
Hubungan *land rent* dan jarak dinyatakan dengan:

$$LR = P (h - b) - P . t . j$$

dimana P adalah produk (kg/ha),
h harga (Rp/kg), b biaya produksi (Rp/kg) dan t ongkos transport (Rp/km.kg)

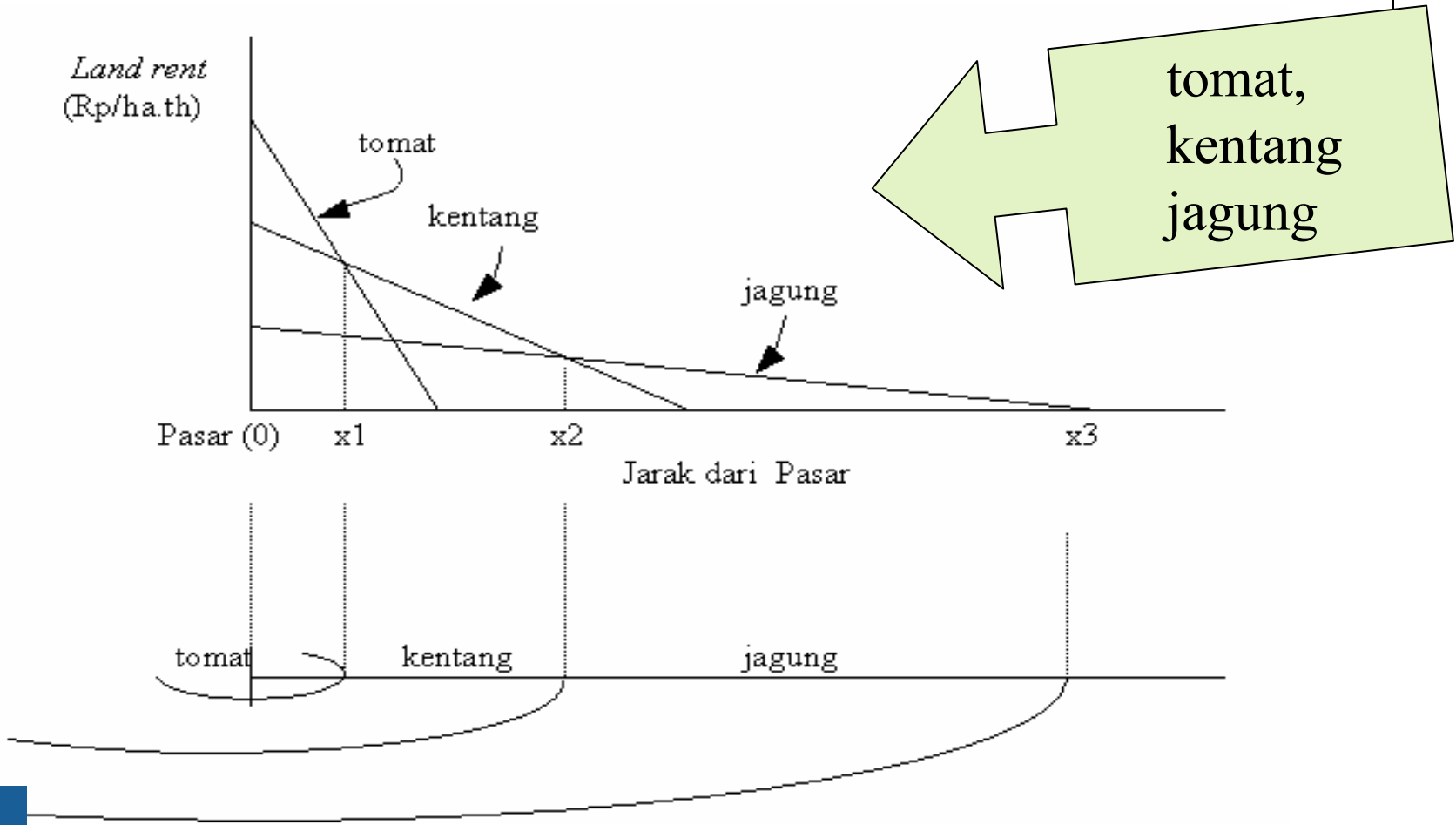
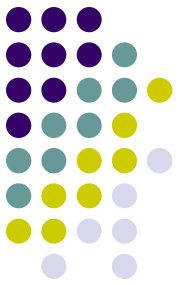
atau disederhanakan menjadi

$$LR = A - B . j$$



Hubungan *land rent* dan jarak dari pusat pasar

VIII. PENGGUNAAN LAHAN



Hubungan *land rent* dan jarak dari pusat pasar



VIII. PENGGUNAAN LAHAN

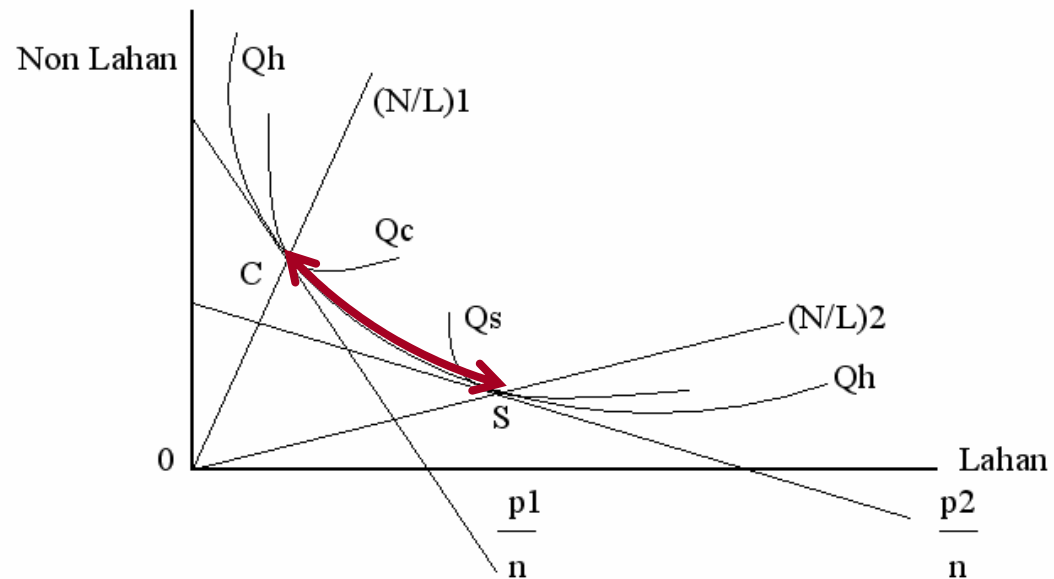


Model Neoklasik

faktor-faktor produksi, terutama lahan, tidak bersifat diskrit (saling komplemen dengan faktor lain) di dalam mempengaruhi sistem produksi (*marginality*),

Keseimbangan di titik C:

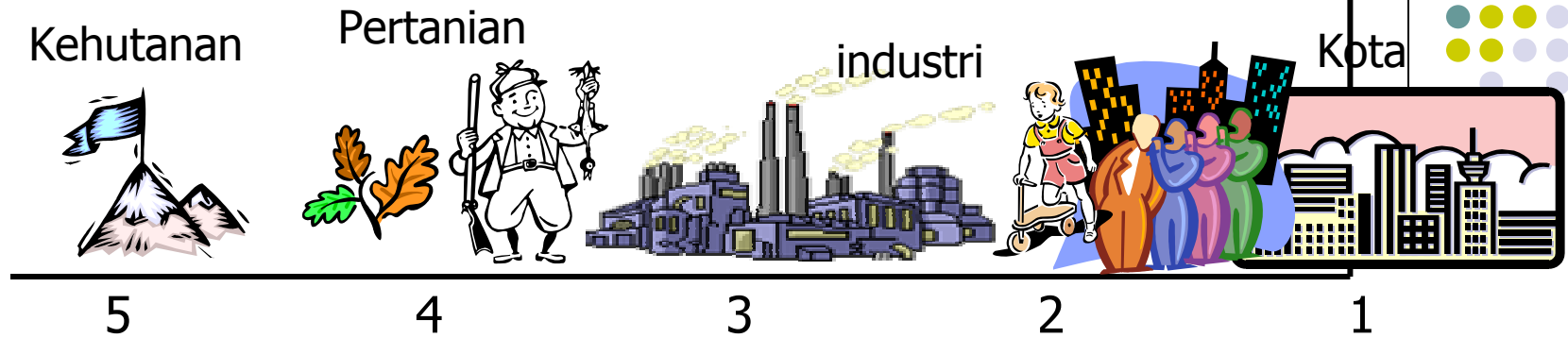
- lahan relatif sempit; dan rasio harga lahan thd non lahan (p_1/n) relatif tinggi
- sistem produksi—sektor primer, sekunder dan tersier—dapat bermukim asal mampu mengoptimalkan penggunaan sumberdaya non lahan dan bersedia menghadapi resiko *land rent* tinggi.



Kurva Transformasi dengan input produksi Lahan dan Non-Lahan (Richardson, 1978)

Sepanjang Kurva isokuan Qh, terlihat bahwa harga atau yang tercermin dalam elastisitas substitusi sangat menentukan kedudukan suatu sektor

VIII. PENGGUNAAN LAHAN

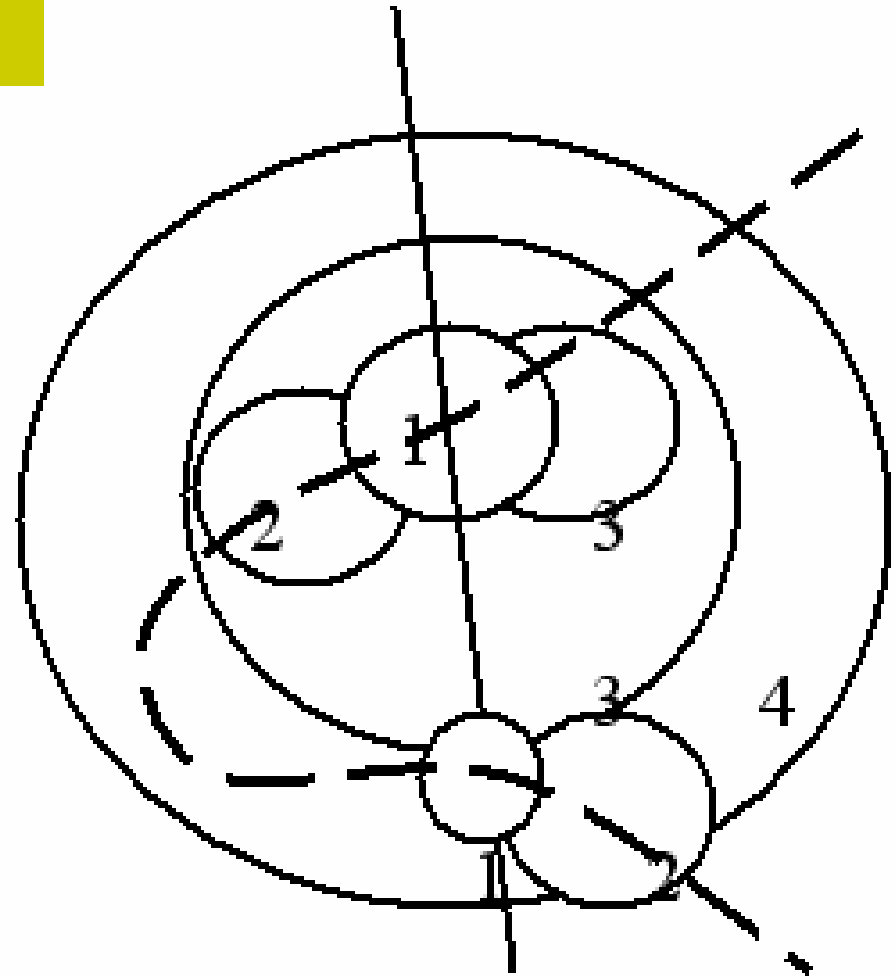
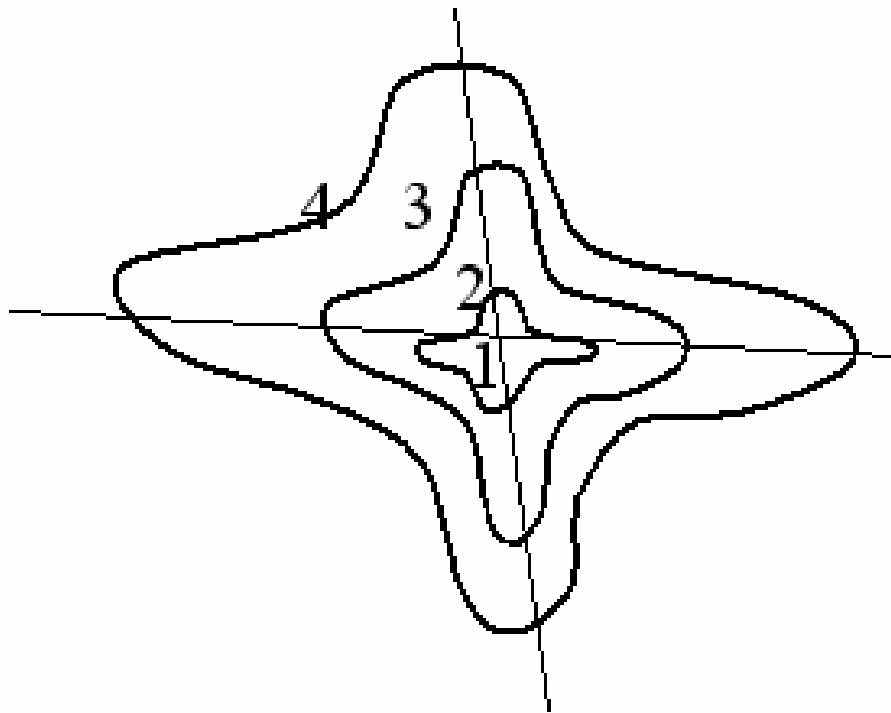


Aplikasi dan Pengembangan Model

- a. **von Thunen**, (1) wilayah non pertanian dengan intensitas perubahan (spekulasi) yang tinggi, (2) merupakan wilayah transisi, memuat ketidakpastian (*uncertainty*) bagi penggunaan lahan di masa mendatang, (3) lahan pertanian transisi, dipengaruhi hegemoni pusat kota dan wilayah transisinya, (4) lahan pertanian tanaman pangan dan ternak (daging dan susu), (5) sentra produksi tanaman pertanian utama mencirikan keunggulan komparatif.
- b. **Burgess**: (1) pusat kota, (2) perdagangan komoditi logistik, (3) pemukiman penduduk padat dan kumuh, (4) pemukiman penduduk pendapatan menengah, (5) pemukiman penduduk berpendapatan tinggi (*single family*), (6) wilayah yang dihuni oleh penglaju (*commuter*)



c. Pengaruh jalan dan pasar



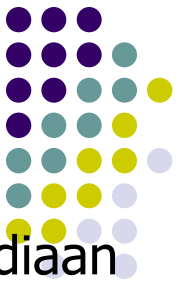
Keterangan:

1. perdagangan
2. industri
3. pemukiman
4. pertanian

--- jalan kereta api
— jalan raya



Kebijakan Penggunaan lahan di Indonesia



UU 5 tahun 1960 tentang pokok Agraria, Pasal 2:

- mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
- menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

ATURAN LAIN

UU 5 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kehutanan

UU 11 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan

UU 3 1972 tentang ketentuan-ketentuan pokok Transmigrasi

UU 11 1974 tentang Pengairan

UU 13 1980 tentang Jalan

UU 5 tahun 1984 tentang Perindustrian

UU 12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman

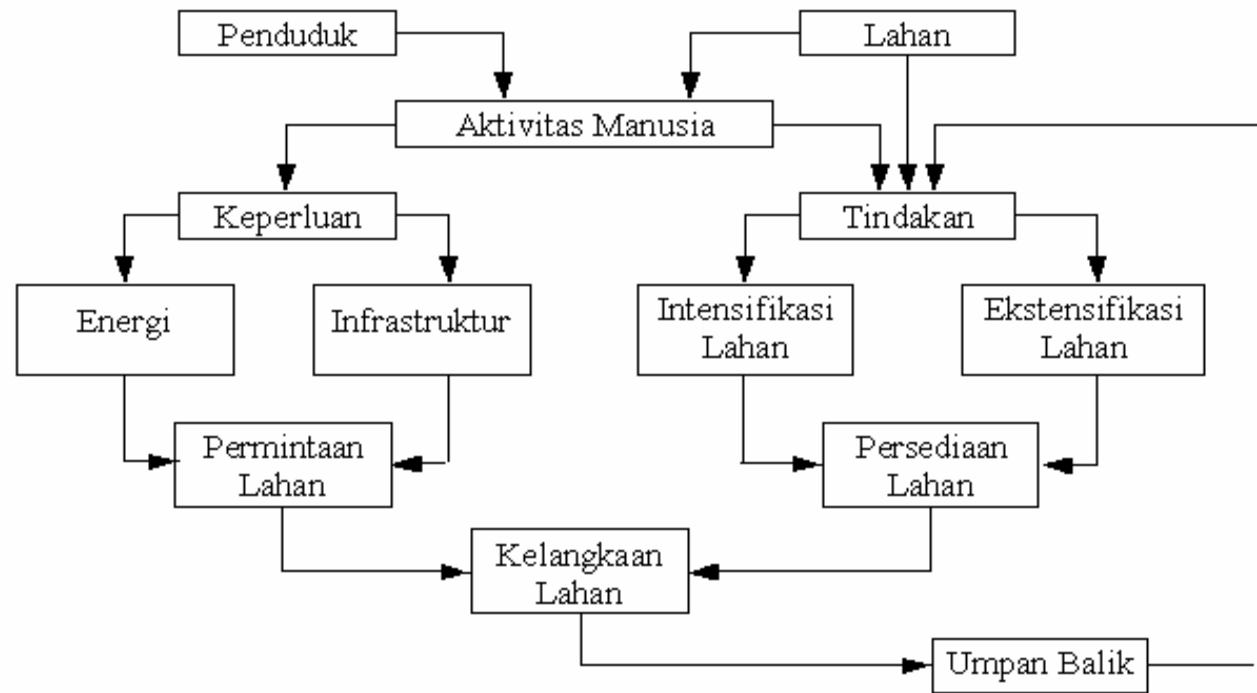
UU 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman

UU 24 1992 Penataan Ruang

Tujuan kebijakan penggunaan lahan

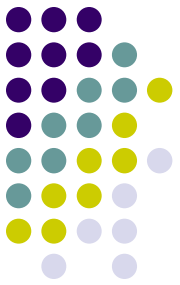


- lahan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat pada saat sekarang maupun akan datang
- digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk kesejahteraan masyarakat



Dinamika penggunaan lahan (Nasoetion, 1995)

- mampu mengakomodasi atau mempertemukan berbagai aktivitas pembangunan dan lokasi-lokasi sesuai peruntukannya, serta meminimalkan konflik kepentingan.



Kebijakan penggunaan lahan

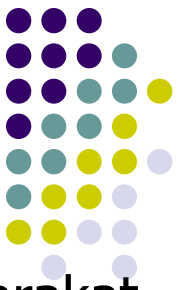
Permasalahan

- tersentralisasi dan tidak operasional
- tidak fleksibel
- kurang tepat memecahkan permasalahan
- tidak efisien
- gagal mengakomodasi kepentingan orang miskin

STRATEGI

1. Pendefinisian status kepemilikan (*property right*)
2. Pendaftaran kepemilikan tanah (*land registration*)
3. Peraturan penggunaan lahan (*land regulation*).
4. partisipasi publik dalam perencanaan (*public intervention*)

IX. KEMISKINAN WILAYAH



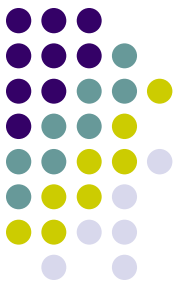
Konsepsi kemiskinan

..... kondisi absolut atau relatif dimana seseorang/kelompok masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, atau struktural, menyebabkan ia tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Penyebab Kemiskinan

- **Kemiskinan natural atau alami** : karena keterbatasan kualitas sumberdaya alam, SDM, lahan kering sulit air, jauh dari akses informasi (terpencil), hambatan geografis yang berat
- **Kemiskinan struktural** : diakibatkan oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan-keputusan dalam pembangunan; ketimpangan kepemilikan sumberdaya, kesempatan dlm berusaha, dan skill
- **Kemiskinan kultural**; disebabkan sikap individu; gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dalam kemiskinan; boros, sikap nrimo, tidak mau bekerja keras dan belajar

IX. KEMISKINAN WILAYAH



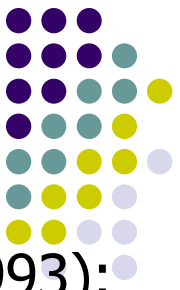
Ukuran dan Kriteria Kemiskinan

- **Ukuran kemiskinan absolut;** berupa garis, titik, atau batas kemiskinan, misal pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, atau kalori.
- **Ukuran kemiskinan relatif;** berupa proporsi atau distribusi; ditarik dari ukuran absolut dalam angka proporsi relatif.

Ada **lima dasar ukuran** batasan kemiskinan di Indonesia

- metode ekivalen beras: **Sajogyo (1975):** tingkat pendapatan pedesaan dan kota ekwivalen 240 dan 360 kg beras per orang per tahun.
- pendekatan biologis dan nutrisi, **Susenas-BPS:** 2100 kalori per kapita per hari, setara tingkat pengeluaran pedesaan dan atau perkotaan sebesar 7239 dan 11527 rupiah per kapita per bulan.
- pendekatan pendapatan dan pengeluaran, **Susenas-Bank Dunia:** *basic food expenditure* setara 16 kg beras per bulan, atau dikonversi 125 persen bila mengkonsumsi bahan pangan lain.
- metode *basic need*, Esmara (1986) *package of basic need*; pendekatan relatif (*dynamic poverty line*), termasuk pengeluaran utk perumahan, pendidikan serta '*social attitudes*' diperhitungkan dalam batas kemiskinan.
- kombinasi empat cara tersebut.

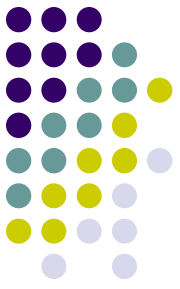
IX. KEMISKINAN WILAYAH



Kemiskinan dpt diestimasi melalui (Bidani dan Ravallion, 1993):

- *Head count index* (HCI), ukuran persentase populasi dibawah garis kemiskinan.
- *Poverty gap index* (PGI), yaitu ukuran jarak rata-rata tingkat konsumsi per kapita populasi secara keseluruhan di bawah garis kemiskinan. Diukur dalam persentase jarak rata-rata terhadap garis kemiskinan. Semakin jauh jarak menyatakan semakin dalam tingkat kemiskinan pada suatu wilayah. PGI adalah indikator potensial kebijakan pengentasan kemiskinan (*minimum cost approach*) dimana prioritas sasaran adalah penduduk yang paling miskin.
- Foster-Greer-Thorbecke *measure index* (P_2), yaitu ukuran yang menyatakan rata-rata dari kuadrat PGI. Hampir serupa dengan PGI, P_2 mencerminkan tingkat *severity of poverty* dan dianggap lebih sensitif terhadap ukuran distribusi kemiskinan.

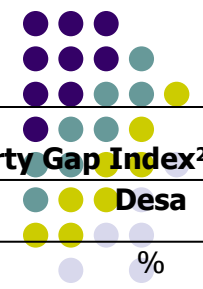
IX. KEMISKINAN WILAYAH



Kebijakan Pembangunan (Konsepsional)

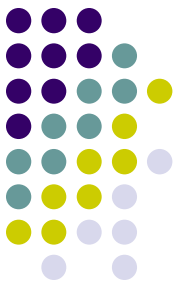
1. Makroekonomi dan struktur ekonomi; efisiensi, multiplier
2. Penyusunan tata ruang ; keunggulan komparatif dan kompetitif; membentuk ikatan ekonomi fungsional
3. Inovasi kelembagaan ; kepemilikan lahan, perlindungan lingkungan
4. Perbaikan *term of trade* (TOT) , sektor pertanian
5. Insentif bagi pengembang sumberdaya; insentif untuk investasi
6. Pendekatan Sosiologis; Perlindungan masyarakat miskin, partisipasi, keterbukaan accountable

Keadaan Kemiskinan Wilayah di Indonesia



No ¹	Propinsi	Proporsi TK Wanita Pertanian thd Wanita Total	Konsumsi per kapita	Peluang Tidak Miskin	Head Count Index ²		Poverty Gap Index ²	
					Kota	Desa	Kota	Desa
		%	Rp	%	%	%	%	%
1	Bengkulu	76,1	445540	0,36	9.60	28.16	1.25	5.22
2	Maluku	70,2	478960	0,36	7.34	33.93	0.94	7.04
3	Jambi	68,4	446010	0,38	5.20	12.80	0.38	1.65
4	Sumsel	66,3	721250	0,41	4.27	18.90	0.34	2.92
5	Riau	71,2	656040	0,43	4.89	16.86	0.55	2.44
6	Aceh	64,9	750030	0,47	6.74	12.35	0.48	1.31
7	Sumut	63,4	757030	0,49	8.18	14.12	0.89	2.04
8	Sumbar	56,1	595280	0,52	0.92	16.38	0.07	2.12
9	Lampung	58,2	427430	0,55	15.74	29.94	2.74	5.55
10	Irja	84,5	309740	0,55	12.61	-	2.41	-
11	Jatim	44,3	753600	0,64	15.28	24.19	2.65	4.28
12	NTT	71,0	341170	0,71	17.95	49.06	4.25	12.78
13	Bali	40,8	894240	0,73	9.68	13.05	1.61	1.96
14	DIY	43,8	487280	0,80	10.68	22.10	0.76	3.43
15	Jateng	36,5	516230	0,91	11.13	29.54	1.10	5.81
16	Kalbar	80,8	751780	1,02	14.69	38.72	2.42	8.21
17	Jabar	34,6	586750	1,13	16.21	18.32	2.94	2.83
18	NTB	49,4	382240	1,22	21.56	28.85	3.67	4.96
19	Kalteng	67,1	790930	1,32	12.34	19.94	1.98	3.28
20	Sultra	68,6	511800	1,32	16.34	31.29	3.32	6.16
21	Sulsel	54,9	470650	1,62	15.22	25.58	3.12	4.82
22	Kalsel	54,0	522660	2,02	0.87	11.54	0.08	1.66
23	Sulteng	57,8	541110	2,17	2.18	29.20	0.11	5.09
24	Kaltim	47,3	821990	2,81	4.85	22.54	0.50	3.41
25	Sulut	42,1	492570	4,25	5.16	22.71	0.77	4.66
26	DKI	0,4	1453890	68,44	1.30	-	0.14	-

X PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERDESAAN



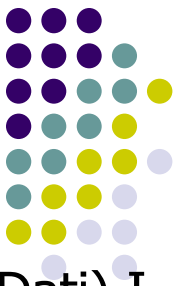
Relevansi

- perekonomian mengandalkan pengelolaan sumber-sumberdaya publik (*common and public resources*), yakni kehutanan, perikanan, atau pengelolaan wilayah perkotaan.
- memenuhi harapan keadilan ekonomi. prinsip yang menghasilkan adalah yang menikmati, dan yang menikmati haruslah yang menghasilkan.
- menurunnya biaya-biaya transaksi (*transaction cost*); biaya informasi, biaya yang melekat dengan harga komoditi, dan biaya pengamanan.
- meningkatnya *domestic purchasing power*. Ada insentif untuk meningkatkan alokasi sumberdaya dan modal dari daerah setempat

Relevan dengan pembangunan berkelanjutan.

- pengurangan kemiskinan dan kesenjangan; menghindarkan terjadinya *misallocation* sumberdaya alam, dalam kerangka pembangunan (organisasi) sosial yang tangguh
- perlindungan dan kelestarian lingkungan. untuk memelihara *bio-social diversity* sebagai prasyarat penting stabilitas alokasi sumberdaya alam dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
- peningkatan produktivitas. yang terencana, terkoordinasi, dan terorganisasi di dalam rangka peningkatan produktivitas nasional dan keberlanjutannya

X PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERDESAAN



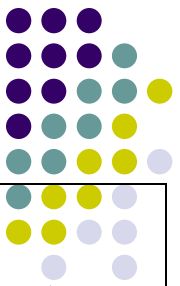
Asas Pembangunan Daerah berdasar UU No 5 tahun 1974

- asas desentralisasi, mengacu kepada pembentukan daerah tingkat (Dati) I dan Dati II sebagai daerah otonom.
- asas dekonsentrasi, aparat pemerintahan pusat yang menerima pendelegasian wewenang dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah.
- asas berbantuan, merupakan 'hasil kompromi' antara asas sentralisasi dan desentralisasi, Dalam asas ini aparat pemerintah daerah melaksanakan tugas pembantuan terhadap urusan pemerintah pusat di daerah.

Implikasi birokrasi pemerintahan dalam otonomi daerah (Setia Budi, 1999).

- **aspek kelembagaan**, adalah hilangnya hubungan hirarki vertikal antara propinsi dengan wilayah administratif di bawahnya.
- **aspek ketatalaksanaan**, redefinisi hubungan antara propinsi dan pemerintahan dibawahnya. Perlu suatu sistem informasi manajemen di dalam birokrasi
- **aspek sumberdaya manusia**, reformasi sistem kepegawaian yang cenderung 'mengumpul' di pusat, sebagian besar pegawai pusat harus dialihkan ke daerah,

X PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERDESAAN



Pembangunan Perdesaan

bagian paling dominan mengisi wacana pembangunan daerah; dilandasi oleh alasan fisik geografis, sumberdaya alam atau sumberdaya manusianya, dan potensi ekonomi (*economic gap*) yang harus dikenali dan diperbaiki.

Permasalahan

- kemiskinan
- kesenjangan
- kegagalan transformasi
- merosotnya *social capital* perdesaan

Kebijakan Pendukung

- pembangunan infrastruktur
- kebijakan ekonomi makro
- kebijakan penataan ruang dan pertanahan
- pengembangan partisipasi masyarakat
- pemerintahan
- membangun kelembagaan

Kebijakan Langsung

- pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan
- penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan.
- peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa
- kebijakan bidang pertanahan

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan¹



Tahun	Jumlah Penduduk						Garis Kemiskinan	
	kota		desa		desa+kota		kota	desa
	juta	%	juta	%	juta	%	rupiah/kapita/bulan	
1976	10.0	38.8	44.2	40.4	54.2	40.1	4522	2849
1978	8.3	30.8	38.9	33.4	47.2	33.3	4969	2981
1980	9.5	29.0	32.8	28.4	42.3	28.6	6831	4449
1981	9.3	28.1	31.3	26.5	40.6	26.9	9777	5877
1984	9.3	23.1	25.7	21.2	35.0	21.6	13731	7746
1987	9.7	20.1	20.3	16.4	30.0	17.4	17381	10294
1990	9.4	16.8	17.8	14.3	27.2	15.1	20614	13295
1993	8.7	13.4	17.2	13.8	25.9	13.7	27905	18244
1996	7.2	9.7	15.3	12.3	22.5	11.3	38246	27413
1998	17.6	21.9	31.9	25.7	49.5	24.2	96959	72780
1999	12.4	15.1	25.1	20.2	37.5	18.2	89845	69420

¹ diambil dari Bappenas (1999)

XI. PEMBANGUNAN PERKOTAAN

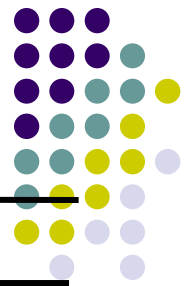


Sejarah pembangunan atau perkembangan kota

- (1) jaman purba (*primeval phase*), memanen
- (2) pertanian tradisional (*early farming phase*), membudidayakan
- (3) perkotaan tradisional (*early urban phase*), 5000 th yg lalu; fenomena Mesopotamia, populasi naik tinggi, penyakit thypus dll, *division of labor*, muncul konsep kepemilikan
- (4) industri modern (*modern industrial phase*), Revolusi Industri di Amerika Utara dan Eropa; 150 hingga 200 tahun yang lalu. Terjadi kenaikan penggunaan sumberdaya, *use of energy*, dan *waste production*, muncul pencemaran



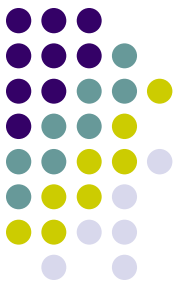
Distribusi Penduduk Perkotaan, Perdesaan dan Dunia 1990



Wilayah	Total Populasi	Persen Penduduk Dunia				Jumlah	
		Total Populasi	Populasi Perdesaan	Populasi Perkotaan	Populasi million-cities	Million-cities	Mega-cities ¹⁾
	juta	-----persen-----					
Dunia	5285	100.0	100.0	100.0	100.0	281	12
Afrika	633	12.0	14.4	8.8	7.5	25	0
Asia	3186	60.3	72.2	44.5	45.6	118	7
Eropa	722	13.7	6.7	22.8	17.9	61	0
Amerika Latin	440	8.3	4.2	13.8	14.7	36	3
Amerika Utara	278	5.3	2.3	9.2	13.1	36	2
Oceania	26	0.5	0.3	0.8	1.3	5	0

¹⁾ Jumlah penduduk di atas 10 juta jiwa antara lain: New York, Los Angeles, Tokyo, Osaka, Seoul, Beijing, Shanghai, Bombai, Calcutta, Sao Paulo, Mexico City, dan Buenos Aires.

XI. PEMBANGUNAN PERKOTAAN

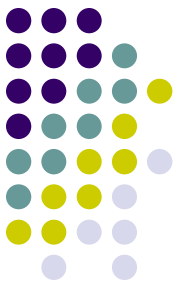


Studi dan Strategi Pembangunan Perkotaan

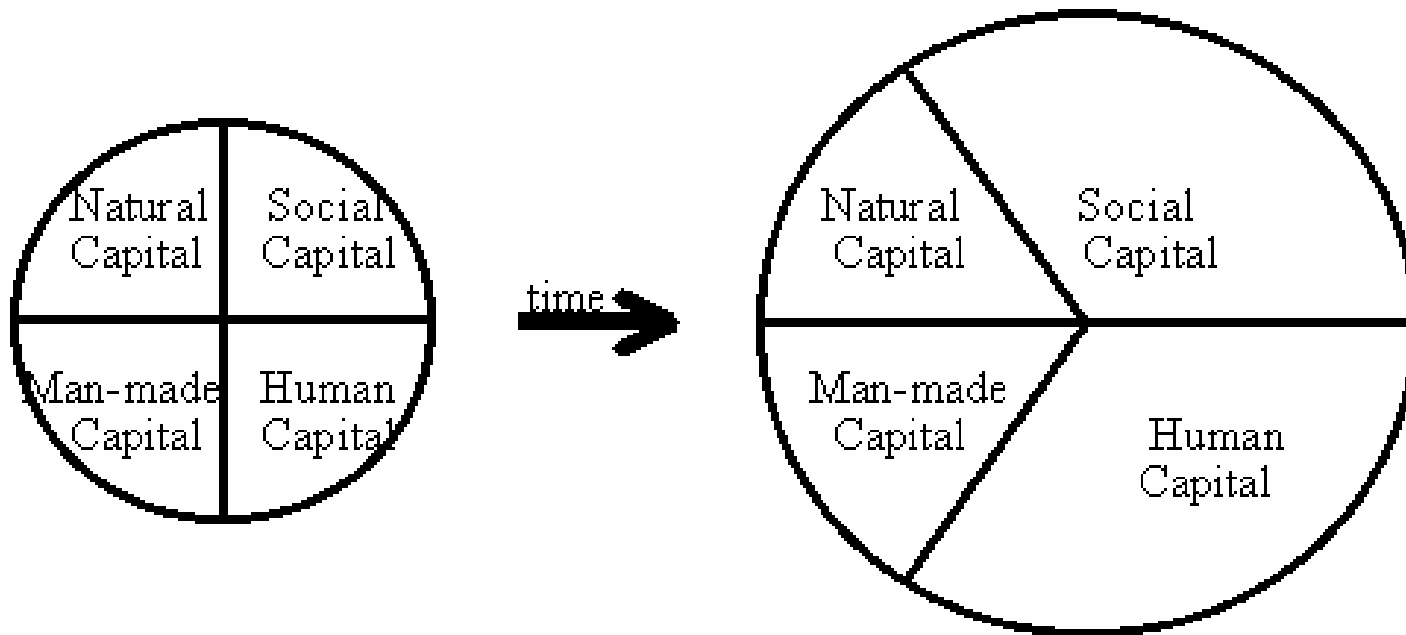
- Sistem perkotaan sejak tahun 1970an dipandang sebagai studi yang interdisipliner melibatkan pemikiran-pemikiran *ecologist* yang difokuskan ke dalam *human system*.
- **'Brown Agenda'** (1972) ketika konferensi Bumi di Stochholm, Swedia. Agenda ini adalah cermin keprihatinan dari dampak buruk industrialisasi perkotaan
- **'Green Agenda'** (1990an). yang spektrum dan pendekatannya meluas Sistem perkotaan yang dipelajari berdimensi *intergeneration* (Serageldin, 1995) dengan sasaran (1) menghapus kemiskinan, (2) melindungi lingkungan, dan (3) meningkatkan produktivitas perkotaan.

AGENDA PEMBANGUNAN PERKOTAAN terletak pada permasalahan warganya (*a human problem*). Permasalahan ini akan terasakan dalam beragam aktivitas manusia, mempengaruhi kehidupan orang-orang miskin dan anak-anaknya, hingga kepada penurunan efisiensi sistem produksi.

XI. PEMBANGUNAN PERKOTAAN



Konsepsi Bank Dunia: apa yang dikenal sustainability as opportunity. Konsep ini berangkat dari definisi : sustainability is to leave future generations as many opportunities as we ourselves have had, if not more



*Sustainability dan kenaikan stock capital per kapita
(Serageldin, 1996)*

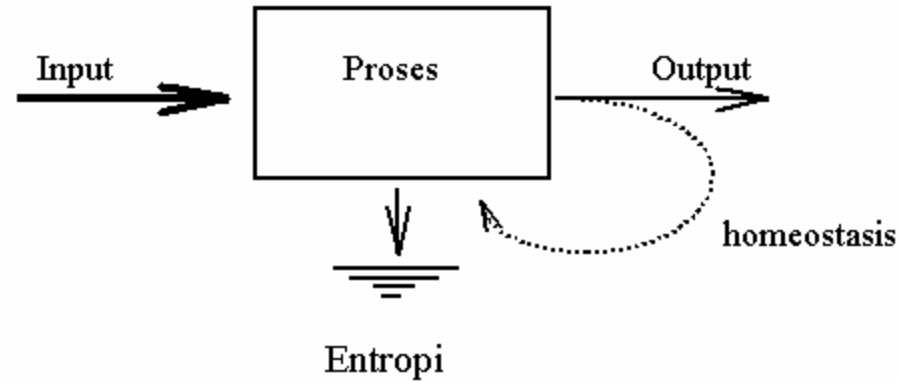


XI. PEMBANGUNAN PERKOTAAN



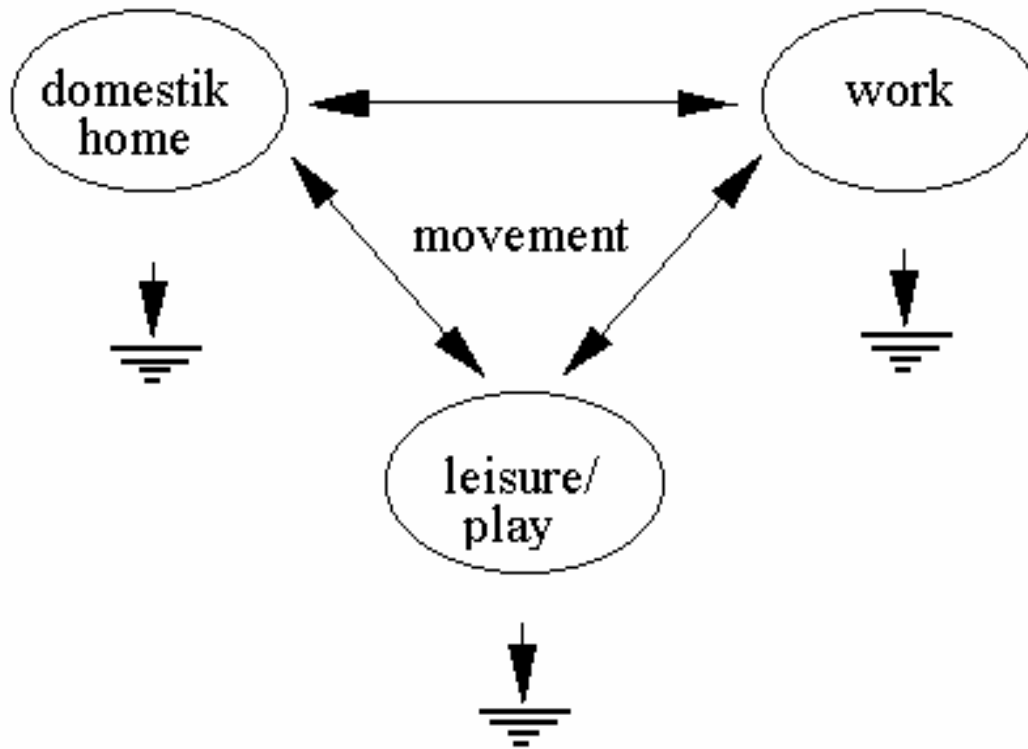
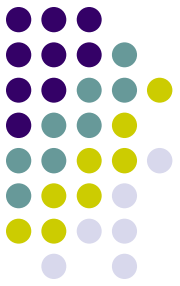
Karakteristik sistem perkotaan

- **sistem tropik** didominasi oleh konsumen
- **input** berasal dari materi (pangan + bahan baku), energi (bahan bakar) dan informasi (iptek) dari *hinterland*, kota-kota fungsional lainnya, dan pengaruh internasional.
- **proses**, ~ keseimbangan (*general equilibrium*) dan interaksi dari kegiatan produksi dan konsumsi; sifat-sifat dualistik, transformasi, iptek
- **Output** berupa materi (barang jadi atau mentah), energi (makanan, bahan bakar industri) dan informasi (iptek) yang mengalir ke subsistem ekologi dan subsistem sosial lainnya
- **Homeostasis**: mekanisme pengendalian agar dalam steady state yang tinggi., berupa social security expenditure dan social capital.
- **entropy**:. bentuk-bentuk ketidakefisienan; misal kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan rendahnya produktivitas perkotaan



Model sederhana dinamika sistem perkotaan

XI. PEMBANGUNAN PERKOTAAN



Human activity systems (Gayden, 1974)

- Mobilitas penduduk/ sum-berdaya kota sangat tinggi
- Aktivitas manusia dibedakan berdasar intensitas lokasi antara rumah, kantor dan rekreasi
- didukung *mode* dan teknologi transportasi yang beragam

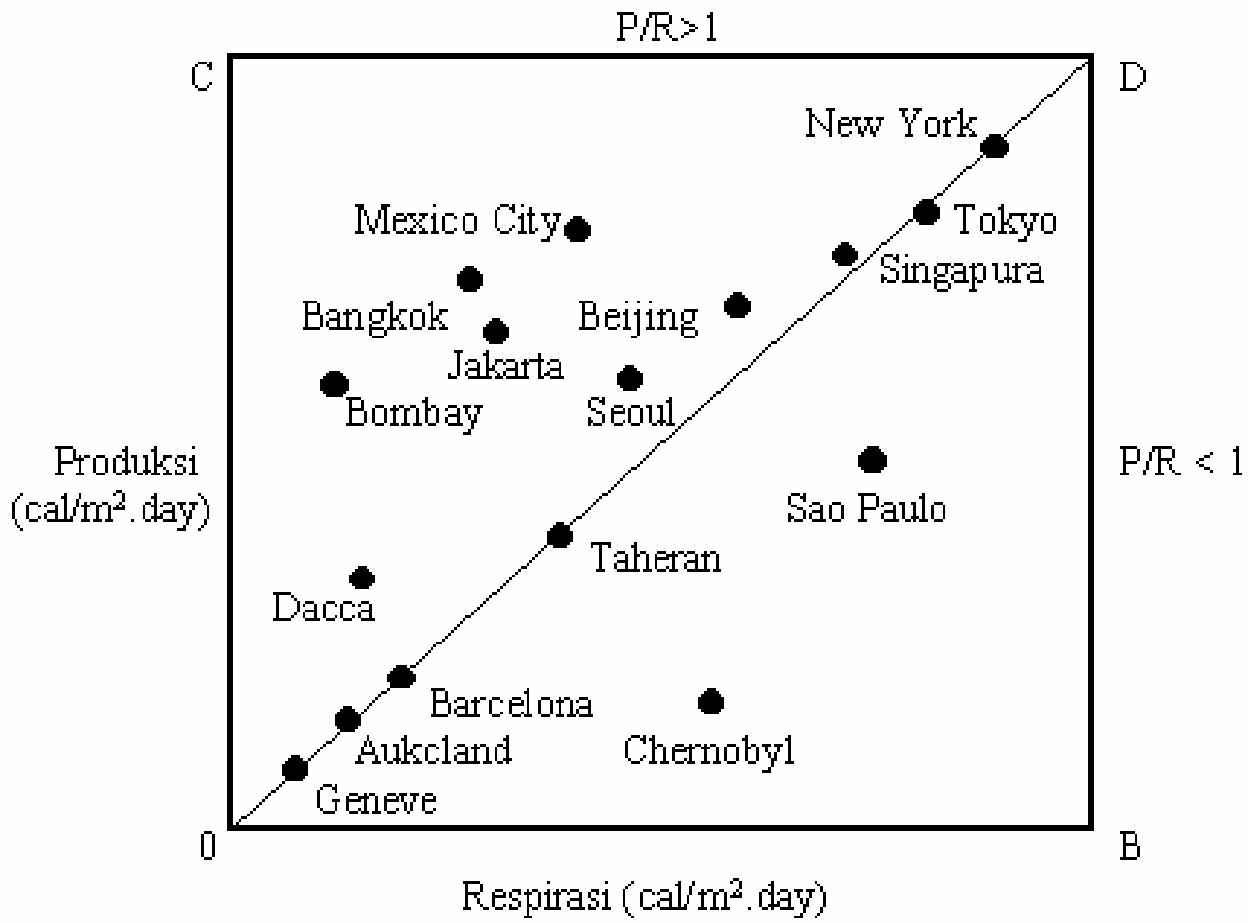
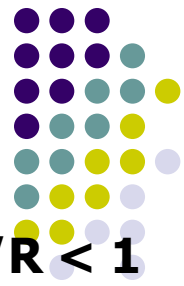
XI. PEMBANGUNAN PERKOTAAN



Kasus-2 *entropy* di perkotaan :

- 1. Bangkok:** masalah pengelolaan **transportasi**. Setiap mobil terjebak kemacetan lalu lintas setara 44 hari dalam setahun. Ketidakefisienan ini selain mempengaruhi GDP Thailand
- 2. Jakarta:** permasalahan sampah. Jakarta juga tidak punya saluran pembuangan (*sewerage system*) yang memadai, sistem *septic tank*nya hanya menampung 25 persen populasi, dan kebanyakan orang menggunakan sungai untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus, serta pembuangan sampah rumah tangga yang jumlahnya sekitar 30 persen
- 3. Cubatao, Brazil** punya masalah dalam **polusi** dan **bahan beracun di udara** dari hasil industri perkotaan. Pada tahun 1980, dari seribu yang lahir, 40 bayi meninggal dalam kandungan dan lebih 40 lainnya meninggal sebelum umur satu minggu (World Bank, 1991).

XI. PEMBANGUNAN PERKOTAAN

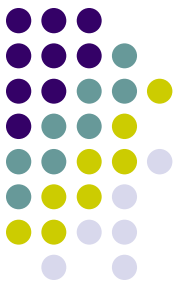


Rasio produksi - respirasi beberapa kota

- Kota dengan $P/R < 1$ sedang menuju entropy, tidak efisien, mengalami penurunan produktivitas dan kualitas
- Kota dengan $P/R > 1$ sedang tumbuh pesat, namun memiliki homeostasis yang lemah
- Kota dengan $P/R = 1$ sedang tumbuh optimal, memiliki homeostasis yang kuat didukung *social capital* dan pemerintah yang *credible*



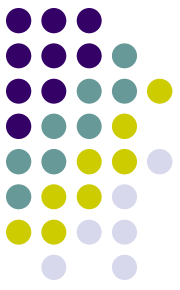
XI. PEMBANGUNAN PERKOTAAN



Kebijakan Pembangunan Perkotaan

- 1. Peningkatan aktivitas ekonomi:** untuk pengembangan (i) sarana infrastruktur, (ii) alokasi lahan (*zoning*) utk aktivitas produksi (iii) meningkatkan efektivitas manajemen perencanaan dan (iv) meningkatkan dukungan sektor finansial.
- 2. Peningkatan produktivitas masyarakat miskin,** meliputi (i) pendidikan dan latihan untuk meningkatkan *skill*, (ii) akses golongan miskin thd fasilitas jasa-jasa sosial dan infrastruktur, dan (iii) dlm jangka pendek memberikan proyek agar dapat mengamankan nasibnya.
- 3. Perlindungan lingkungan hidup;** (i) mencegah kerusakan lingkungan, (ii) rehabilitasi hidup akibat beban pencemaran, (iii) perbaikan sanitasi.
- 4. Membangun *social capital*,** membangun persepsi yang sama (*social equality*), penguatan fungsi-fungsi pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan kota serta peningkatan ketahanan sosial.

XII. AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH

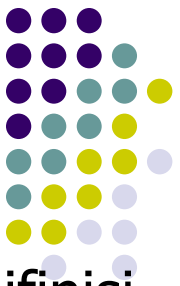


Fenomena Aktual

- 1. Liberalisasi perdagangan :** pentingnya sinergi, kualitas SDM (competitive advantage) , organisasi non pasar
- 2. Teknologi informasi dan internet ,** e-commerce, tidak ada transport cost,
- 3. Otonomi daerah ;** kewenangan daerah
- 4. Kemiskinan ,** ketergantungan nilai tukar
- 5. Hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi** , hak merasa aman, akses dan kesejahteraan



XII. AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH

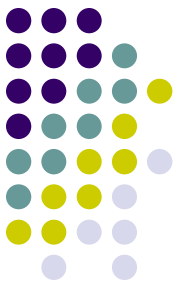


Agenda KE DEPAN

1. PEMBANGUNAN EKONOMI : meliputi (i) Aktualisasi dan redefinisi nilai-nilai HAM, (ii) Memberantas kemiskinan, (iii) Penguatan keuangan daerah, (iv) Antisipasi perdagangan bebas, (v) Pembangunan sektor teknologi informasi
2. PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KELEMBAGAAN , meliputi (i) Peraturan perundangan HAM (ii) Kelembagaan pengentasan kemiskinan, (iii) *Political will* otonomi dan pembenahan administrasi daerah, (iv) Kelembagaan mengantisipasi globalisasi, (v) Kelembagaan teknologi digital.
3. PEMBANGUNAN SEKTOR LINGKUNGAN meliputi ; (i) Pemberdayaan partisipasi masyarakat, (ii) Pembangunan dan rehabilitasi lingkungan masyarakat miskin, (iii) Desentralisasi pengelolaan lingkungan, (iv) Perlindungan faktor-faktor produksi dan penataan ruang, (v) *Filing* dan penyebaran data lingkungan.



XII. AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH



Kebijakan Pembangunan Perkotaan

- 1. Peningkatan aktivitas ekonomi:** untuk pengembangan (i) sarana infrastruktur, (ii) alokasi lahan (*zoning*) utk aktivitas produksi (iii) meningkatkan efektivitas manajemen perencanaan dan (iv) meningkatkan dukungan sektor finansial.
- 2. Peningkatan produktivitas masyarakat miskin,** meliputi (i) pendidikan dan latihan untuk meningkatkan *skill*, (ii) akses golongan miskin thd fasilitas jasa-jasa sosial dan infrastruktur, dan (iii) dlm jangka pendek memberikan proyek agar dapat mengamankan nasibnya.
- 3. Perlindungan lingkungan hidup;** (i) mencegah kerusakan lingkungan, (ii) rehabilitasi hidup akibat beban pencemaran, (iii) perbaikan sanitasi.
- 4. Membangun *social capital*,** membangun persepsi yang sama (*social equality*), penguatan fungsi-fungsi pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan kota serta peningkatan ketahanan sosial.



TERIMAKASIH

